KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

BPLJSKB

BPLJSKB
BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN &
SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

**VEHICLE TESTING &
CERTIFICATION CENTER**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengujian tipe dan mendukung program keselamatan transportasi darat yang aman, nyaman, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia selama periode 2025-2029.

Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan terhadap pembangunan bidang perhubungan darat yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Muatan kebijakan dan rencana aksi dalam Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis di bidang transportasi darat, sehingga diharapkan dapat membawa level kinerja penyelenggaraan pengujian tipe menjadi lebih baik di masa datang.

Semoga dokumen ini menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam mendukung transportasi darat yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam mendukung perwujudan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Bekasi, 31 Desember 2025
a. Kepala Balai Pengujian Laik Jalan dan
Sertifikasi Kendaraan Bermotor

IMAN SUKANDAR, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **v**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **vi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Kondisi Umum 1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 1
1.1.2 Capaian Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024 3
1.2. Potensi dan Permasalahan 6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN **14**
2.1 Visi 14
2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 14
2.1.2. Visi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor . 14
2.2 Misi 14
2.2.1. Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 14
2.2.2. Misi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 15
2.3 Tujuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 15
2.3.1. Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 15
2.3.2. Tujuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 29
2.4 Sasaran Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 34
2.4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 34

2.4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 39

BAB III ARAH KEBIJAKAN BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR 46

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi 46

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 46

3.1.2 Arah dan Kebijakan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 53

3.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 55

3.3 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 60

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 65

4.1 Target Kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025 – 2029 65

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan 65

4.1.2 Target Keluaran (*Output*) Pelaksanaan Kegiatan 68

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029 71

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan 71

4.2.2 Skema Pendanaan 75

4.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Bidang Transportasi Darat Tahun 2025-2029 76

BAB V PENUTUP 81

5.1 Kesimpulan 81

5.2 Arahan Pimpinan 81

5.3 Mekanisme Evaluasi 81

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2
Tabel I. 2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024 4
Tabel I. 3 Capaian Kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024 5
Tabel I. 4 Tantangan dan Peluang pada Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan 12
Tabel II. 1 Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 17
Tabel II. 2 Indikator Tujuan Balai pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 30
Tabel II. 3 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 35
Tabel II. 4 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 36
Tabel II. 5 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 40
Tabel II. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 41
Tabel III. 1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 47
Tabel III. 2 Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 50
Tabel III. 3 Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 54
Tabel IV. 1 Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 66
Tabel IV. 2 Tabel Keluaran (Output) RENSTRA Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029 68
Tabel IV. 3 Target Indikator dan Kerangka Pendanaan 2025-2029 72
Tabel IV. 4 Matrik Manajemen Risiko BPLJSKB Dalam Renstra 2025-2029 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Alur Penyusunan Perencanaan 1
Gambar I. 2 Bagan Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 3
Gambar I. 3 Analisis Situasional Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 9
Gambar II. 1 Misi Ditjen Perhubungan Darat 15
Gambar II. 2 Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045 16
Gambar II. 3 Casecading Indikator Konektivitas Angkutan Penumpang 18
Gambar II. 4 Casecading Indikator Konektivitas Angkutan Barang 19
Gambar II. 5 Casecading Indikator Pelayanan Angkutan Penumpang 20
Gambar II. 6 Casecading Indikator Pelayanan Angkutan Barang 21
Gambar II. 7 Casecading Indikator Keselamatan LLAJ 22
Gambar II. 8 Casecading Indikator Konektivitas Transportasi ASDP 23
Gambar II. 9 Casecading Indikator Pelayanan Transportasi ASDP 24
Gambar II. 10 Cascading Keselamatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 32
Gambar III. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 61
Gambar IV. 1 Skema Pendanaan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Darat Tahun 2025-2029 76

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I Manual Perhitungan Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor
2. Lampiran II Indikasi Kebutuhan Pendanaan Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi panduan bagi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam menyusun kebijakan dan anggaran tahunan selama periode 2025-2029. Renstra ini merupakan hasil turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029.

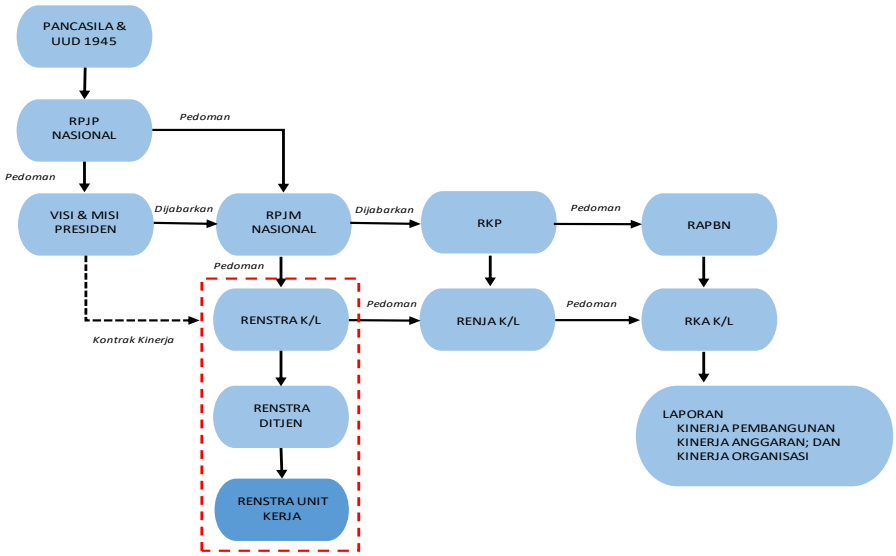

Gambar I. 1 Alur Penyusunan Perencanaan

Renstra juga harus mampu mengukur pencapaian tujuan dan sasaran melalui pengukuran kinerja yang berkesinambungan. Hal ini meliibatkan hubungan antara indikator kinerja, arah kebijakan, strategi implementasi dan evaluasi tahunan dan lima tahunan untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan penganggaran kedepan.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1 Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dijabarkan pada Tabel 1.1. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa “Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan

keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat".

Tabel I. 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

NO	ASPEK	PENGATURAN DALAM PM 4 TAHUN 2025
1	Kedudukan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat
2	Tugas Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan uji tipe kendaraan bermotor dan penyiapan bahan sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
3	Fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	a. Penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, dan rencana bisnis anggaran; b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan uji tipe; c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan uji sampel; d. Pelaksanaan penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama uji pengembangan prototipe kendaraan bermotor; e. Pengawasan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor; f. Pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan dan penilaian kinerja fasilitas peralatan pengujian serta sarana dan prasarana penunjang lainnya; g. Pelaksanaan kalibrasi sarana dan prasarana uji tipe; h. Pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan kendaraan bermotor dan penyelenggaraan sistem informasi pengujian tipe kendaraan bermotor; i. Pelaksanaan standarisasi metode pengujian tipe; j. Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian fisik rancang bangun kendaraan bermotor di wilayah Jakarta; k. Pelaksanaan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; l. Pelaksanaan pemeriksaan intern; m. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi, reformasi birokrasi, perlengkapan, barang milik negara, data dan informasi; dan n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Susunan organisasi dan tata kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor disajikan pada gambar berikut.

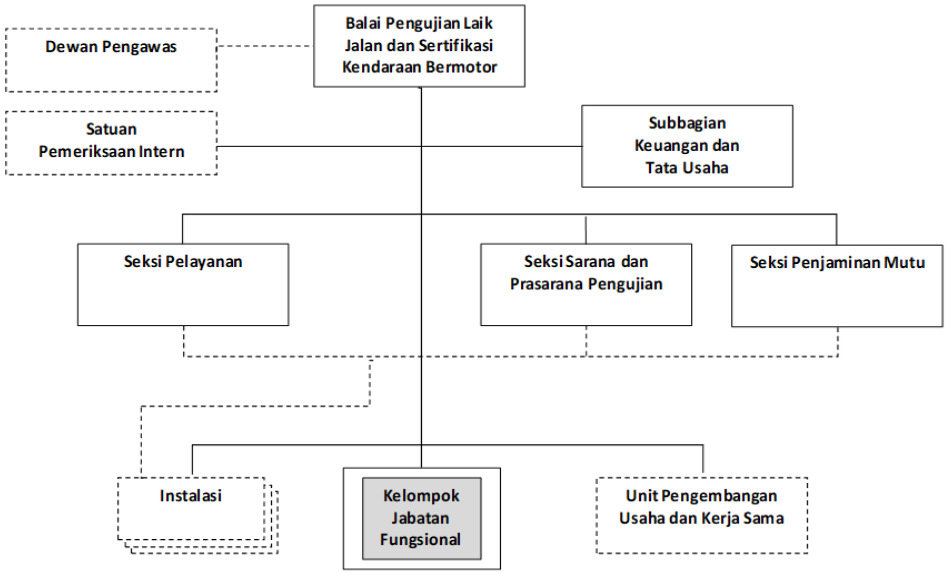

Gambar I. 2 Bagan Susunan Organisasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

1.1.2 Capaian Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024

Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024 dirumuskan berdasarkan sasaran nasional pembangunan pada sektor transportasi pada RPJMN 2020-2024. Sasaran program ini juga memperhatikan visi misi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta permasalahan pembangunan yang terjadi pada periode tersebut. Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024 diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan atau IKK. Tabel I.2 menyajikan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024.

Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor pada Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024 memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai dukungan terhadap Sasaran Program (SP) pada level Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2020-2024. Realisasi dan capaian kinerja kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024 dijelaskan pada Tabel I.2, dimana terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu Program Infrastruktur Konektivitas (GA) dan Program Dukungan Manajemen (WA).

Tabel I.2 menggambarkan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor hingga tahun 2024 beserta target yang

hendak dicapai sampai dengan tahun 2024. Dari indikator tersebut, realisasi tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel I. 2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan		IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	REALISASI S.D 2024	TARGET S.D 2024
1	SK1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Jumlah fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor beserta fasilitas pendukungnya	Unit	35	35
			IKK 2	Tersedianya pelayanan pengujian tipe kendaraan yang memenuhi standar ISO 9001	Sertifikat	1	1
			IKK 3	Tersedianya laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO 17025	Sertifikat	1	1
2	SK2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 4	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	19	19
3	SK3	Meningkatnya Kualitas Penyelengaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 5	Terselenggaranya dukungan teknis BPLJSKB	Bulan	12	12
			IKK 6	Pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe	Unit	24	24
			IKK 7	Peningkatan kualitas SDM BPLJSKB	Kegiatan	2	2

Dari tabel diatas, secara keseluruhan, data ini mencerminkan capaian kinerja yang positif pada beberapa indikator kinerja kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Akan tetapi, juga menunjukkan area kritis seperti korelasi dan indikator yang belum sesuai dengan tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai unit kerja pelaksana pengujian tipe. Namun dari sisi realisasi kinerja, Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan dan arah kebijakan yang tertuang dalam renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2020-2025.

Adapun rincian realisasi indikator kinerja kegiatan renstra 2020-2025 seperti tersaji pada tabel dibawah:

Tabel I. 3 Capaian Kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
				T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
GA – Program Infrastruktur Konektivitas																		
	SK 1	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi**																
1	IKK 1	Jumlah fasilitas pengujian tipe kendaraan bermotor beserta fasilitas pendukungnya	Unit	-	-	-	9	9	100	11	11	100	7	6	85,71	7	7	100
2	IKK 2	Tersedianya pelayanan pengujian tipe kendaraan yang memenuhi standar ISO 9001	Sertifikat	-	-	-	1	1	100	1	1	100	1	1	100	-	-	-
	IKK 3	Tersedianya laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO 17025	Sertifikat	-	-	-	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
	SK 2	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat**																
4	IKK4	Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	Unit	-	-	-	9	9	100	8	8	100	2	2	100	-	-	-
WA – Program Dukungan Manajemen																		
	SK 3	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**																
5	IKK5	Terselenggaranya dukungan teknis BPLJSKB	Bulan	-	-	-	12	12	100	12	12	100	12	12	100	12	12	100
6	IKK6	Pengembangan fasilitas layanan pengujian tipe	Unit	-	-	-	6	6	100	6	6	100	6	6	100	6	6	100
7	IKK7	Peningkatan kualitas SDM BPLJSKB	Kegiatan	-	-	-	2	2	100	2	2	100	2	2	100	2	2	100

Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap muatan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2024. Penyusunan indikator (input, output, dan outcome) belum menggambarkan relasi antar indikator. Sebaliknya, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target saja. Jika evaluasi hanya menggunakan persentase realisasi terhadap target saja, maka suatu keberhasilan atau kegagalan pencapaian target output. Capaian target output dipengaruhi oleh input yang digunakan, sehingga perubahan input dapat mempengaruhi kemampuan BPLJSKB untuk memenuhi target output yang ditetapkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, kerangka kerja penyusunan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pengukuran kinerja Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 tidak hanya menggunakan perbandingan target & realisasi output saja, tetapi juga menggunakan realisasi anggaran sebagai penilaian kinerja anggaran untuk mengukur efisiensi kinerja terhadap anggaran;
b. Penyusunan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 perlu memperhatikan relasi antara output dengan outcome untuk mengetahui efektivitas output untuk menghasilkan suatu manfaat yang diharapkan (outcome) maupun relasi antara input dengan output untuk mengetahui efisiensi penggunaan input untuk menghasilkan suatu output.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Analisis potensi, permasalahan, peluang, dan tantangan pada Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 menggunakan pendekatan identifikasi isu strategis dan analisis situasional pada sektor perhubungan darat. Identifikasi isu strategis dilakukan untuk menemukenali permasalahan yang perlu dijawab dalam jangkah menengah. Sementara itu, analisis situasional dilakukan untuk menemukenali faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi sektor perhubungan darat.

Isu strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan pengujian tipe
   Tingginya tuntutan perbaikan pelayanan publik, keharusan mewujudkan *Good Governance* dan memiliki fleksibiltas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta, penerapan kualitas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas untuk mewujudkan kendaraan yang memenuhi aspek berkeselamatan.
2. Regulasi dan kewenangan
   Berkembangnya teknologi dan regulasi internasional di bidang kendaraan bermotor, harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan pengujian tipe bertaraf international mengingat belum terdapat aturan yang berlaku dalam

skala nasional khususnya terkait pengujian emisi kendaraan bermotor yang sesuai dengan regulasi ASEAN MRA.

3. Ketersediaan Sumber Daya

   Dalam upaya meningkatkan pelayanan pengujian tipe bertaraf international, BPLJSKB berupaya menyiapkan fasilitas pengujian tipe sesuai dengan teknologi dan regulasi internasional. Kondisi saat ini, beberapa fasilitas layanan pengujian tipe dilaksanakan dengan skema KPBU yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Selain itu, beberapa laboratorium pengujian tipe masih belum tersertifikasi ISO.

4. Kebutuhan *Actual Data*

   Kebutuhan sistem informasi pengembangan data aktual untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pelayanan pengujian tipe. Permasalahan pelayanan perlu diselesaikan dengan pemanfaatan pangkalan data yang bersifat actual (actual data). Actual data ini mempermudah kinerja BPLJSKB untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan, membuat keputusan, meningkatkan kualitas respons darurat melalui identifikasi titik-titik permasalahan, serta membuat kinerja lebih efisien.

Analisis situasional bidang perhubungan darat dilakukan dengan pendekatan *PESTEL Analysis* sebagai berikut:

1. Political
   a. Regulasi dan kebijakan terkait penetapan pajak dan tarif impor yang tinggi untuk kendaraan dan suku cadang dapat meningkatkan harga jual dan menurunnya daya beli masyarakat; dan
   b. Kebijakan perluasan pasar otomotif domestik dan ekspor, serta peningkatan penjualan kendaraan listrik dan *hybrid*.
2. Economic
   a. Target pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2029 adalah 8%. Industri otomotif menjadi salah satu faktor penggerak mesin pertumbuhan ekonomi; dan
   b. Peningkatan investasi kendaraan listrik dan relaksasi TKDN sebesar 40% semula pada tahun 2024 menjadi tahun 2026.
3. Social
   a. Minimnya aksesibilitas dan ketersediaan transportasi umum yang aman dan nyaman menjadikan masyarakat bergantung pada kendaraan pribadi. Sehingga menajdikan sebagai gaya hidup dan suatu pilihan; dan
   b. Preferensi pribadi di saman modern yang menuntut mobilitas tinggi sehingga mendorong massyarakat memeiliki kendaraan pribadi.
4. Technology
   a. Perkembangan teknologi dan regulasi internasional di bidang kendaraan bermotor sesuai UN Regulation; dan

b. Perkembangan teknologi otomotif berbahan bakar listrik untuk mengurangi ketergantungan sektor transportasi pada penggunaan bahan bakar fosil.

5) Enviromental

a. Standar emisi gas buang yang ketat menuntut perusahaan memproduksi kendaraan yang ramah lingkungan; dan

b. Tuntutan bagi penurunan lntensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

6) Legal

a. Regulasi di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor yang sesuai dengan UN Regulation;

b. Pentingnya penyediaan kendaraan yang berkeselamatan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

Penjabaran analisis situasional secara ringkas disajikan pada **Gambar I.3**

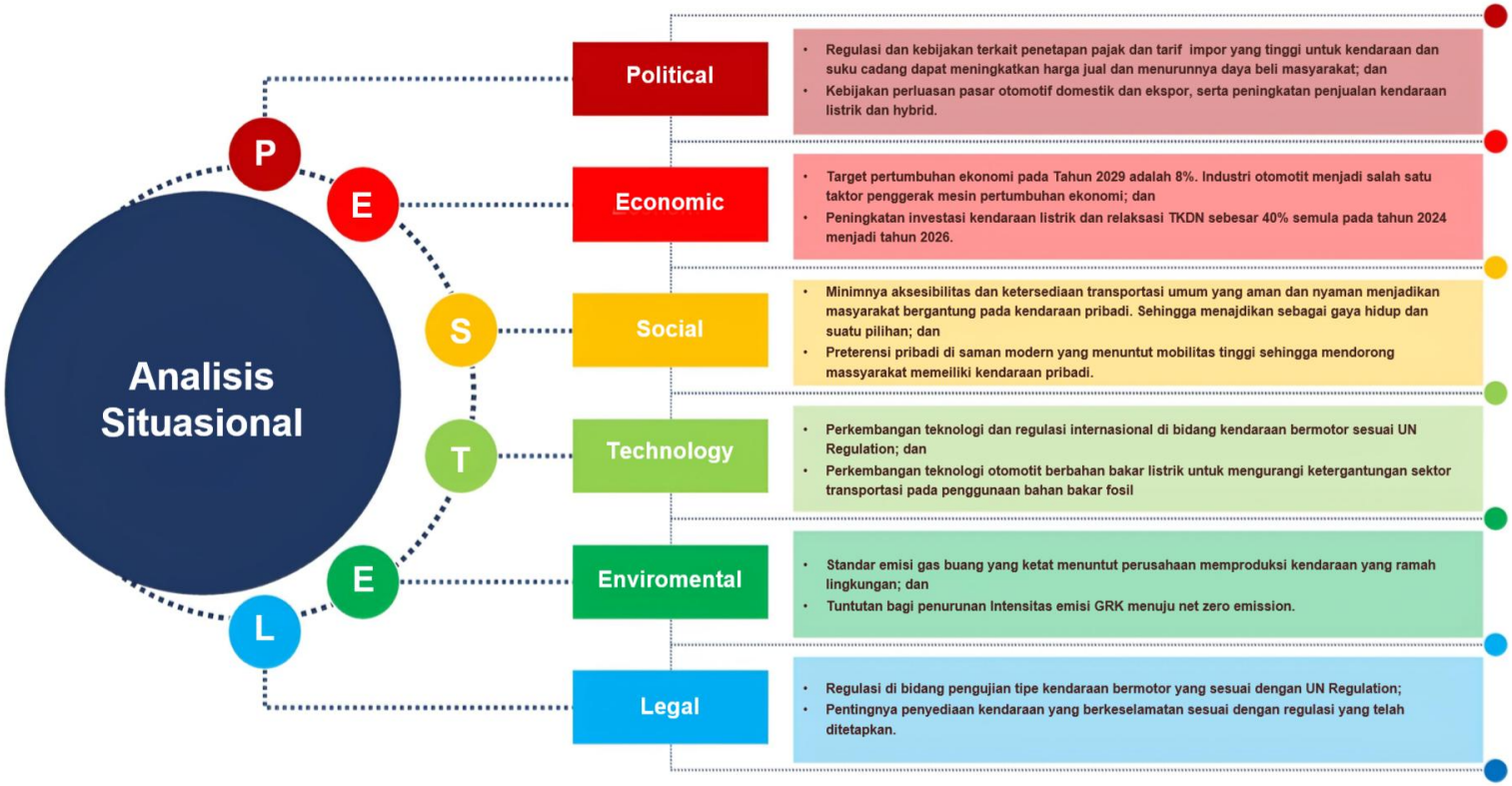

Gambar I. 3 Analisis Situasional Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Analisis tantangan dan peluang untuk menjawab isu strategis dan analisis situasional dari faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana disajikan pada **Tabel I.4** adalah sebagai berikut:

1. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengujian tipe adalah sebagai berikut:
   a. Tantangan untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengujian tipe adalah sebagai berikut:
      - Belum terdapat pelayanan pengujian untuk kepentingan pengembangan Prototype teknologi kendaraan bermotor baik untuk akedemisi maupun dengan pihak perakit/pembuat; dan
      - Belum mengcover seluruh pengujian yang berada pada ruang lingkup ASEAN MRA.
   b. Peluang untuk meningkatkan kinerja pelayanan pengujian tipe adalah sebagai berikut:
      - BPLJSKB Mampu melayani seluruh kebutuhan pelayanan pengujian tipe;
      - BPLJSKB menjadi Lembaga pengujian tipe yang modern, akuntabel, efisien, efektif, transparan dan professional.
2. Tantangan dan peluang terkait regulasi dan kewenangan pengujian tipe kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
   a. Tantangan terkait regulasi dan kewenangan pengujian tipe kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
      - Belum terdapat aturan yang berlaku dalam skala nasional khususnya terkait pengujian emisi kendaraan bermotor yang sesuai dengan regulasi ASEAN MRA; dan
      - Belum terdapat aturan yang mengatur tentang emisi mode test di lingkungan Kementrian Perhubungan. Saat ini emisi mode test diatur terpisah dalam peraturan lain yakni di Kementerian Lingkungan Hidup.
   b. Peluang terkait regulasi dan kewenangan pengujian tipe kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
      - Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN; dan
      - Tersedianya jasa layanan pengujian tipe sesuai standar/regulasi Nasional dan Internasional.

3. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengujian tipe adalah sebagai berikut:
   a. Tantangan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengujian tipe adalah sebagai berikut:
      - Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe yang berstandar Internasional; dan
      - Ketersediaan SDM yang mampu untuk melakukan pengujian tipe sesuai dengan regulasi UN-R.
   b. Peluang untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengujian tipe adalah sebagai berikut:
      - Terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN; dan
      - Pelayanan pengujian tipe yang berstandar Internasional yang terakreditasi ISO.
4. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan kebutuhan kebutuhan aktual data adalah sebagai berikut:
   a. Tantangan untuk meningkatkan kebutuhan aktual data layanan pengujian tipe tipe kendaraan bermotor adalah penyusunan analisis masalah, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pelayanan pengujian tipe untuk menemukenali masalah pelayanan pengujian tipe di BPLJSKB.
   b. Peluang untuk meningkatkan kebutuhan kebutuhan aktual data adalah sebagai berikut:
      - Digitalisasi penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe dengan pengembangan sistem informasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pelayanan pengujian tipe; dan
      - Penerapan Sistem Manajemen yang Terintegrasi *(Integrated Management System).*

Tabel I. 4 Tantangan dan Peluang pada Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029

NO	ISU STRATEGIS	TANTANGAN	PELUANG
1.	Kinerja pelayanan pengujian tipe	• Belum terdapat pelayanan pengujian untuk kepentingan pengembangan Prototype teknologi kendaraan bermotor baik untuk akedemisi maupun dengan pihak perakit/pembuat • Belum mengcover seluruh pengujian yang berada pada ruang lingkup ASEAN MRA	• BPLJSKB Mampu melayani seluruh kebutuhan pelayanan pengujian tipe • BPLJSKB menjadi Lembaga pengujian tipe yang modern, akuntabel, efisien, efektif, transparan dan professional
2.	Regulasi dan kewenangan	• Belum terdapat aturan yang berlaku dalam skala nasional khususnya terkait pengujian emisi kendaraan bermotor yang sesuai dengan regulasi ASEAN MRA • Belum terdapat aturan yang mengatur tentang emisi mode test di lingkungan Kementrian Perhubungan. Saat ini emisi mode test diatur terpisah dalam peraturan lain yakni di Kementerian Lingkungan Hidup	• Tingginya kebutuhan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor dari pembuat/perakit atau pengimpor kendaraan bermotor di wilayah Indonesia maupun regional ASEAN • Tersedianya jasa layanan pengujian tipe sesuai standar/regulasi Nasional dan Internasional
3.	Ketersediaan Sumber Daya	• Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe yang berstandar Internasional; • Ketersediaan SDM yang mampu untuk melakukan pengujian tipe sesuai dengan regulasi UN-R;	• Terbatasnya fasilitas uji tipe kendaraan bermotor di wilayah regional ASEAN • Pelayanan pengujian tipe yang berstandar Internasional yang terakreditasi ISO

NO	ISU STRATEGIS	TANTANGAN	PELUANG
4.	Kebutuhan aktual data	Analisis masalah, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pelayanan pengujian tipe belum sepenuhnya berbasis data aktual untuk menemukenali masalah pelayanan pengujian tipe di BPLJSKB.	• Digitalisasi penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe dengan pengembangan sistem informasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pelayanan pengujian tipe. • Penerapan Sistem Manajemen yang Terintegrasi *(Integrated Management System).*

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

2.1.1. Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 diturunkan dari Visi Indonesia Emas 2045, Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, dan Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah:

"Transportasi Darat Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Pemaknaan transportasi darat Indonesia maju dengan mengacu pada uraian Naskah Teknokratik Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 – 2029, yaitu: tersedianya jaringan dan layanan transportasi darat yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan.

2.1.2. Visi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan oleh BPLJSKB serta turunan dari visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Visi BPLJSKB adalah:

"Menuju terselenggaranya lalu lintas dan angkutan jalan yang nyaman, lancar dan selamat serta ramah lingkungan"

2.2 Misi

2.2.1. Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 diturunkan dari Misi Asta Cita Presiden 2025-2029 dan Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 sebagaimana disajikan pada **Gambar II.1** adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan;
b. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru;
c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman;
d. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan;
e. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama;
f. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau;

g. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat;
h. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim.

Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029	Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.	1. Menyediakan transportasi yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan	1. Menyediakan transportasi darat yang inklusif dan berkeadilan sesuai standar pelayanan dan keselamatan
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2. Mewujudkan dukungan transportasi thdp ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru	2. Mewujudkan dukungan transportasi darat terhadap ketahanan dan kemandirian nasional melalui penguatan industri transportasi yg berbasis ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi yang merata dan terintegrasi secara kesisteman	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur transportasi darat yang merata dan terintegrasi secara kesisteman
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	4. Memperkuat kualitas SDM transportasi dan penerapan kebijakan transportasi yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan	4. Memperkuat kualitas SDM transportasi darat dan penerapan kebijakan transportasi darat yang sesuai perkembangan teknologi, prinsip kesetaraan dan keberlanjutan
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	5. Memperkuat konektivitas transportasi nasional untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama	5. Memperkuat konektivitas transportasi darat untuk mendukung hilirisasi, industrialisasi, dan sektor ekonomi utama
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Membangun transportasi perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau	6. Membangun konektivitas transportasi darat pada wilayah perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan terjangkau
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi nasional	7. Melanjutkan transformasi tatakelola dalam penyelenggaraan transportasi darat
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	8. Mewujudkan transportasi ramah lingkungan dan berketahanan iklim	8. Mewujudkan transportasi darat yang ramah lingkungan dan berketahanan iklim

Gambar II. 1 Misi Ditjen Perhubungan Darat

Sumber: Draft Renstra Ditjen Darat, 2024

2.2.2. Misi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Misi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor diturunkan dari Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029. Adapun misi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

a. Memastikan semua tipe kendaraan bermotor yang akan dirakit, diimpor, diproduksi dan dipasarkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
b. Penerapan kebijakan pelayanan pengujian tipe sesuai dengan perkembangan teknologi kendaraan ;
c. Memperkuat kualitas SDM melalui peningkatan integritas pegawai *(building integrity).*

2.3 Tujuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

2.3.1. Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional merupakan sasaran pada periode jangka menengah 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029 menggunakan pendekatan *balanced scorecard* atau BSC. Penggunaan *balanced scorecard* mengacu pada

pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Pendekatan *balanced scorecard* membagi proses kerja pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ke dalam 4 (empat) perspektif sebagaimana disajikan pada **Gambar II.2** adalah sebagai berikut:

a. *Stakeholders Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pemangku kepentingan pada bidang perhubungan darat berupa manfaat atau dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan untuk mendukung terwujudnya Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 dan mendukung Visi Indonesia 2045;

b. *Customer Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan pengguna layanan transportasi darat berupa hasil atau outcome dari penyelenggaraan *transportasi* darat sesuai lingkup tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi darat, yaitu: konektivitas dan layanan transportasi darat yang berkualitas dan berkeselamatan;

c. *Internal Business Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di bidang perhubungan darat yang diwujudkan melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan infrastruktur transportasi (sarana, dan prasarana) maupun pengembangan SDM sektor transportasi darat yang berkualitas;

d. *Learning and Growth Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Direktorat Perhubungan Darat dalam penyediaan input/masukan bagi jalannnya organisasi berupa penyediaan SDM internal, pendanaan, pengelolaan data dan informasi, perlengkapan kerja, regulasi, organisasi dan tata *kerja* yang dikelola sesuai prinsip *good governance*.

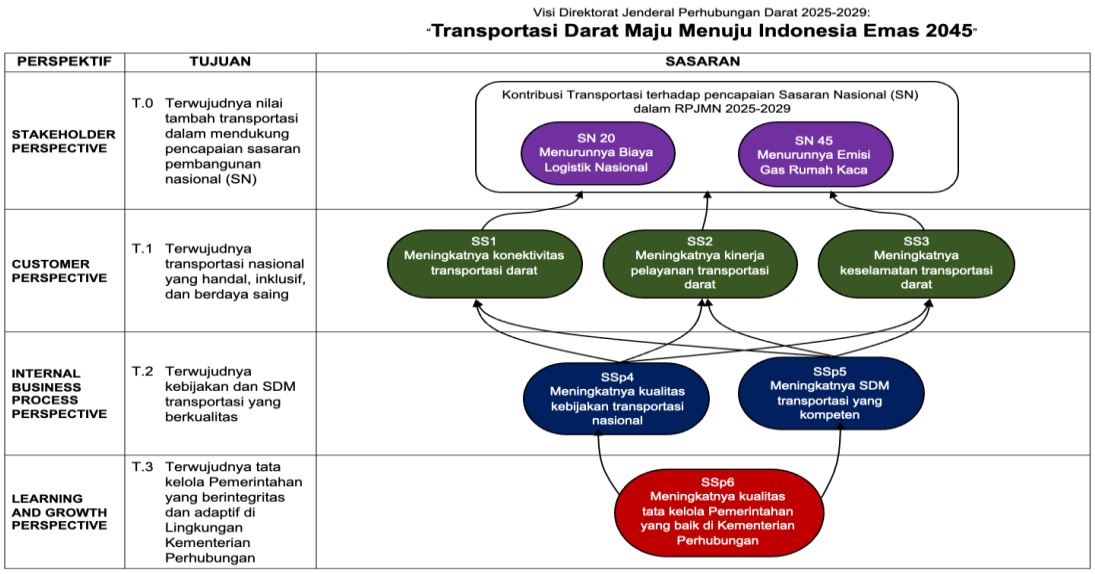

Gambar II. 2 Transportasi Darat Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Tabel II. 1 Indikator Tujuan Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029

PERSPEKTIF		TUJUAN		INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN
STAKEHOLDER PERSPECTIVE *(Externalities)*	T.0	Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029		Kinerja pada level *Stakeholder Perspective* diukur pada tingkatan nasional (RPJMN 2025-2029)		1. Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan (Juta Penumpang) 2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan (kumulatif) 3. Ketersediaan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan 4. Lokasi Rawan Kecelakaan yang ditangani 5. Terminal Penumpang yang Beroperasi 6. Pelabuhan Penyeberangan yang Beroperasi 7. Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan 8. Volume Angkutan Penyeberangan
CUSTOMER PERSPECTIVE (*Core Business*)	T.1	Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing	IKT.1	Capaian kinerja penyediaan layanan transportasi darat	%	Capaian Kinerja Penyediaan Layanan Transportasi Darat (CKL_{TD}) $\boldsymbol{CKL_{TD} = (RRK_{TD}/TRK_{TD} + RIKM_{TD}/TIKM_{TD} + RTK_{TJ}/TTK_{TJ})/3}$ RRK_{TD} = Realisasi Rasio Konektivitas Transportasi Darat TRK_{TD} = Target Rasio Konektivitas Transportasi Darat $RIKM_{TD}$ = Realisasi IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat $TIKM_{TD}$ = Target IKM terhadap pelayanan publik sektor transportasi darat RTK_{TJ} = Realisasi Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan TTK_{TJ} = Target Tingkat Keselamatan Transportasi Jalan
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE (*Technical Support*)	T.2	Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	IKT.2	Capaian kinerja penyusunan rekomendasi kebijakan dan peningkatan SDM transportasi	%	Diukur pada Badan Kebijakan Transportasi dan Badan Pengembangan SDM Perhubungan, tetapi Ditjen Perhubungan Darat menyumbang kegiatan mendukung pencapaian Indikator
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (*Management Support*)	T.3	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	IKT.3	Capaian kinerja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan	%	Capaian Kineja Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan ($CKRB_{KP}$) $\boldsymbol{CKRB_{KP} = (RIRB_{KP}/TIRB_{KP})}$ $RIRB_{KP}$ = Realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan $TIRB_{KP}$ = Target Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Perhubungan

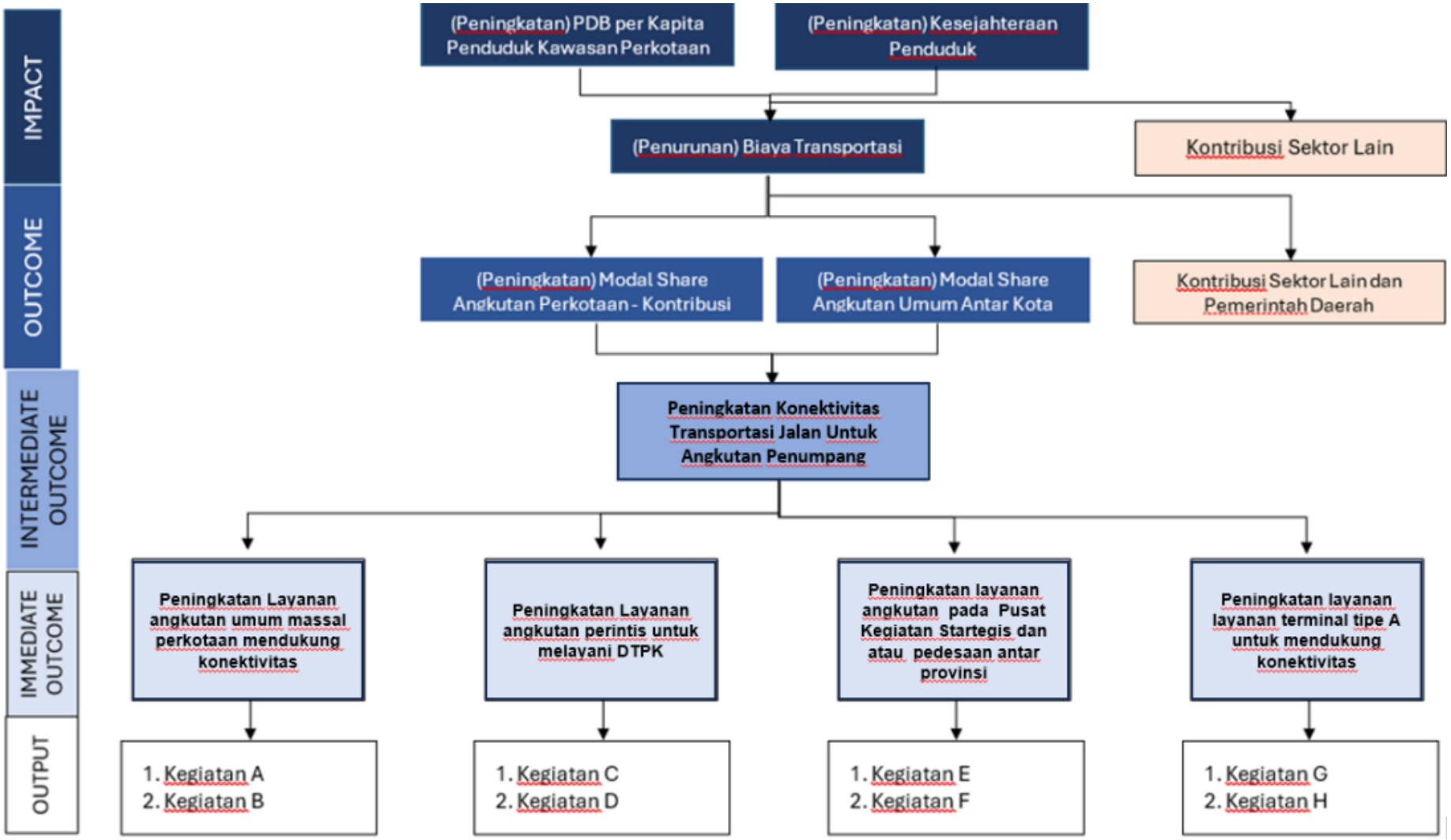

Gambar II. 3 Casecading Indikator Konektivitas Angkutan Penumpang

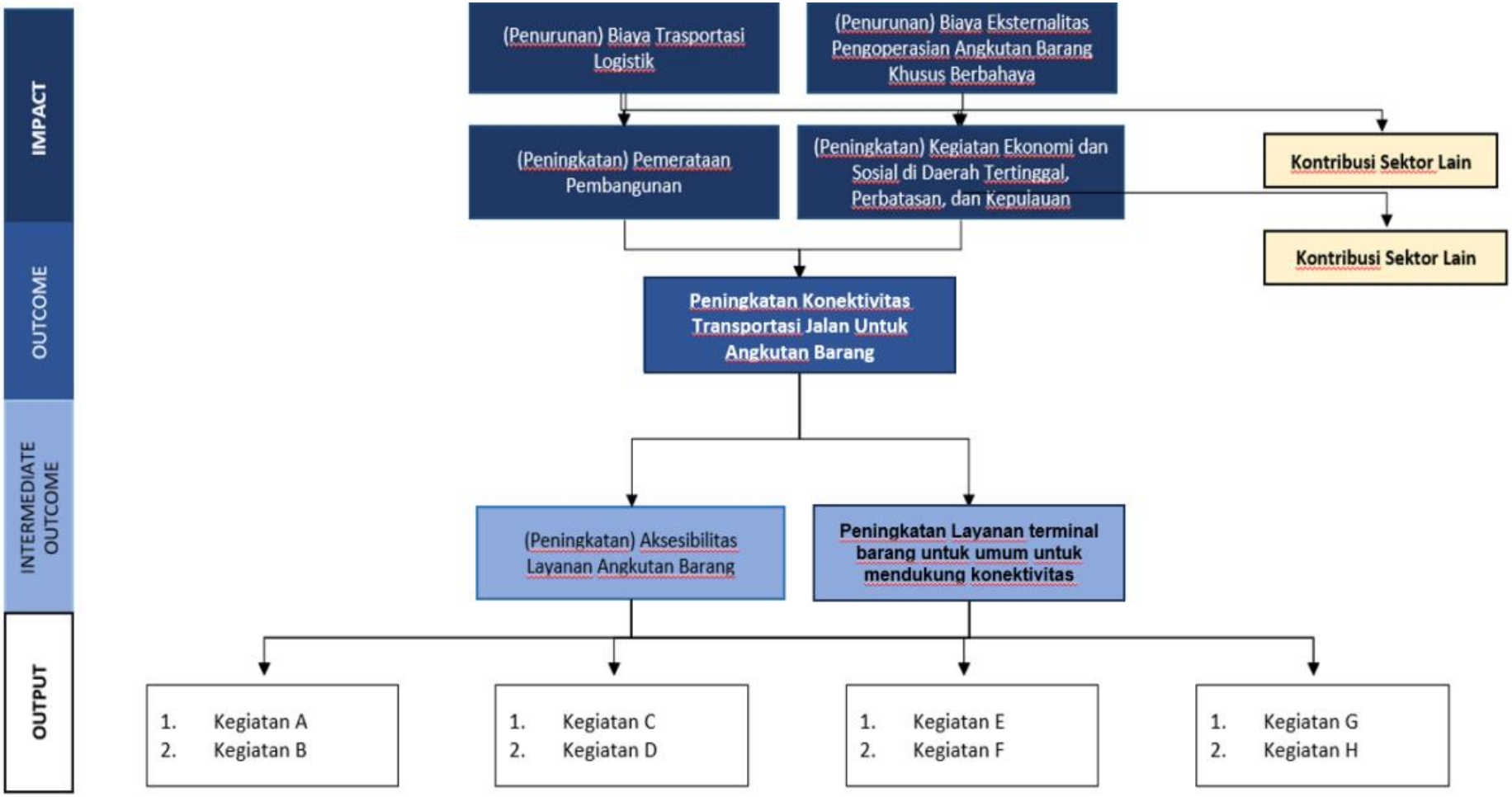

Gambar II. 4 Casecading Indikator Konektivitas Angkutan Barang

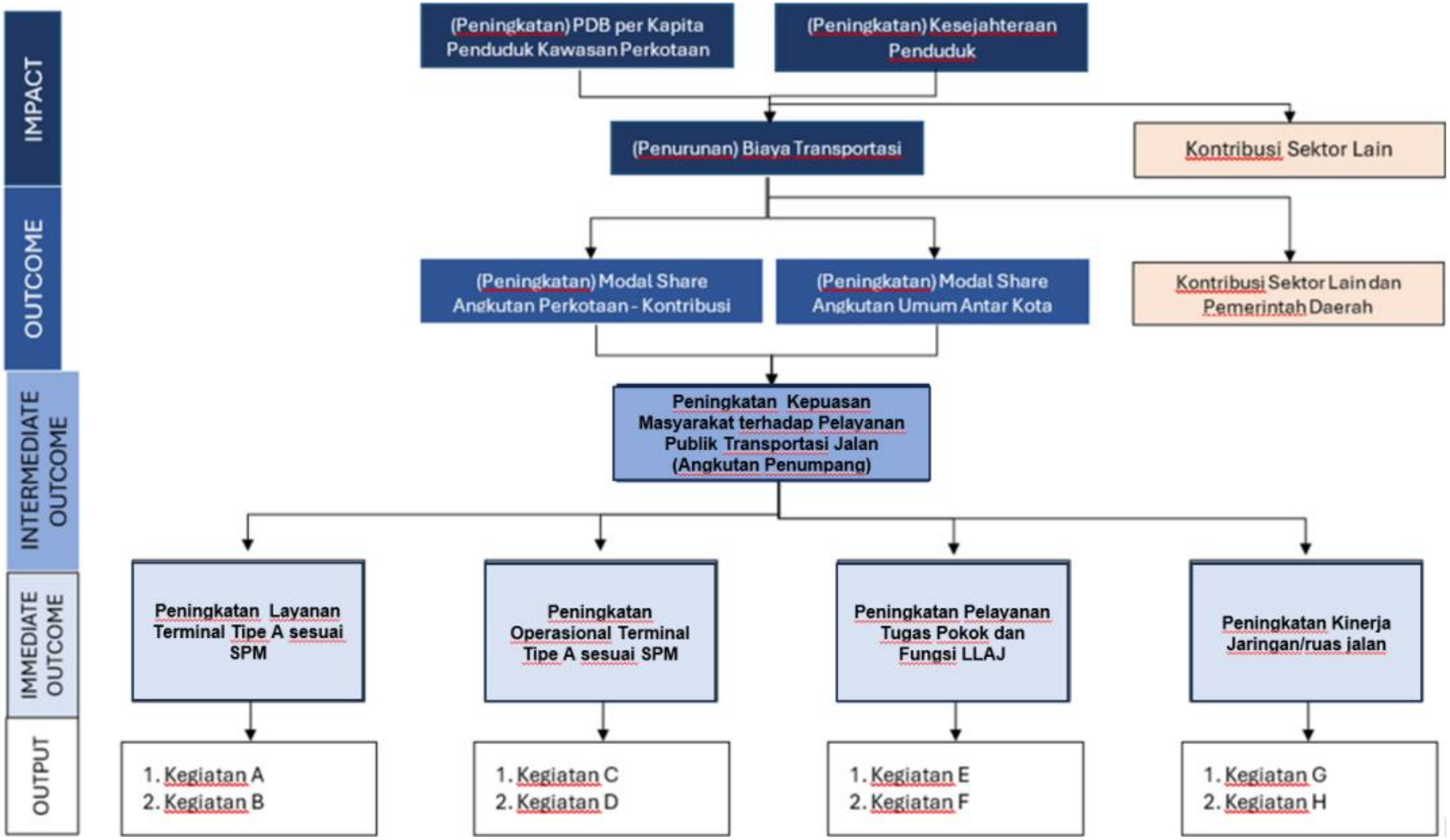

Gambar II. 5 Casecading Indikator Pelayanan Angkutan Penumpang

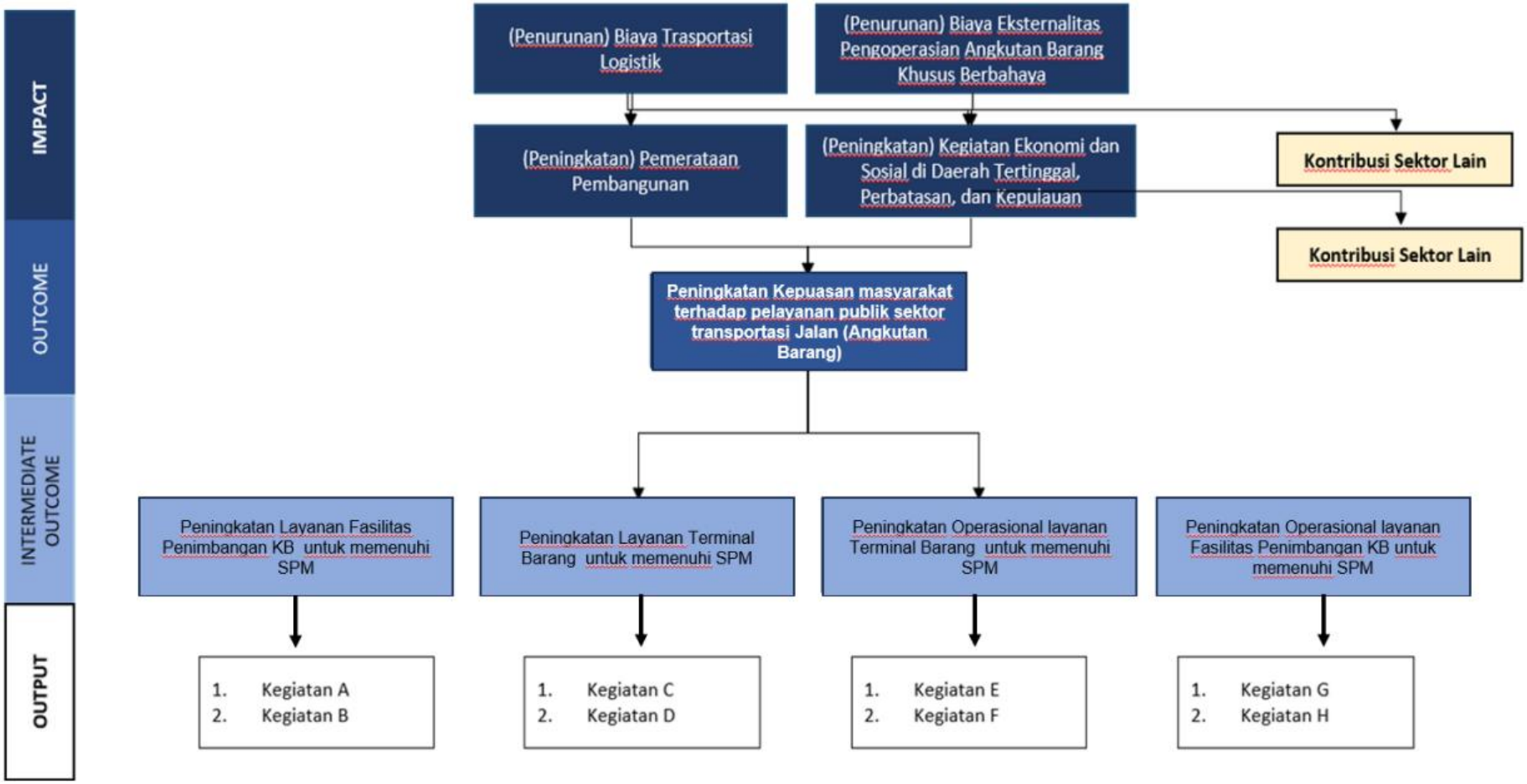

Gambar II. 6 Casecading Indikator Pelayanan Angkutan Barang

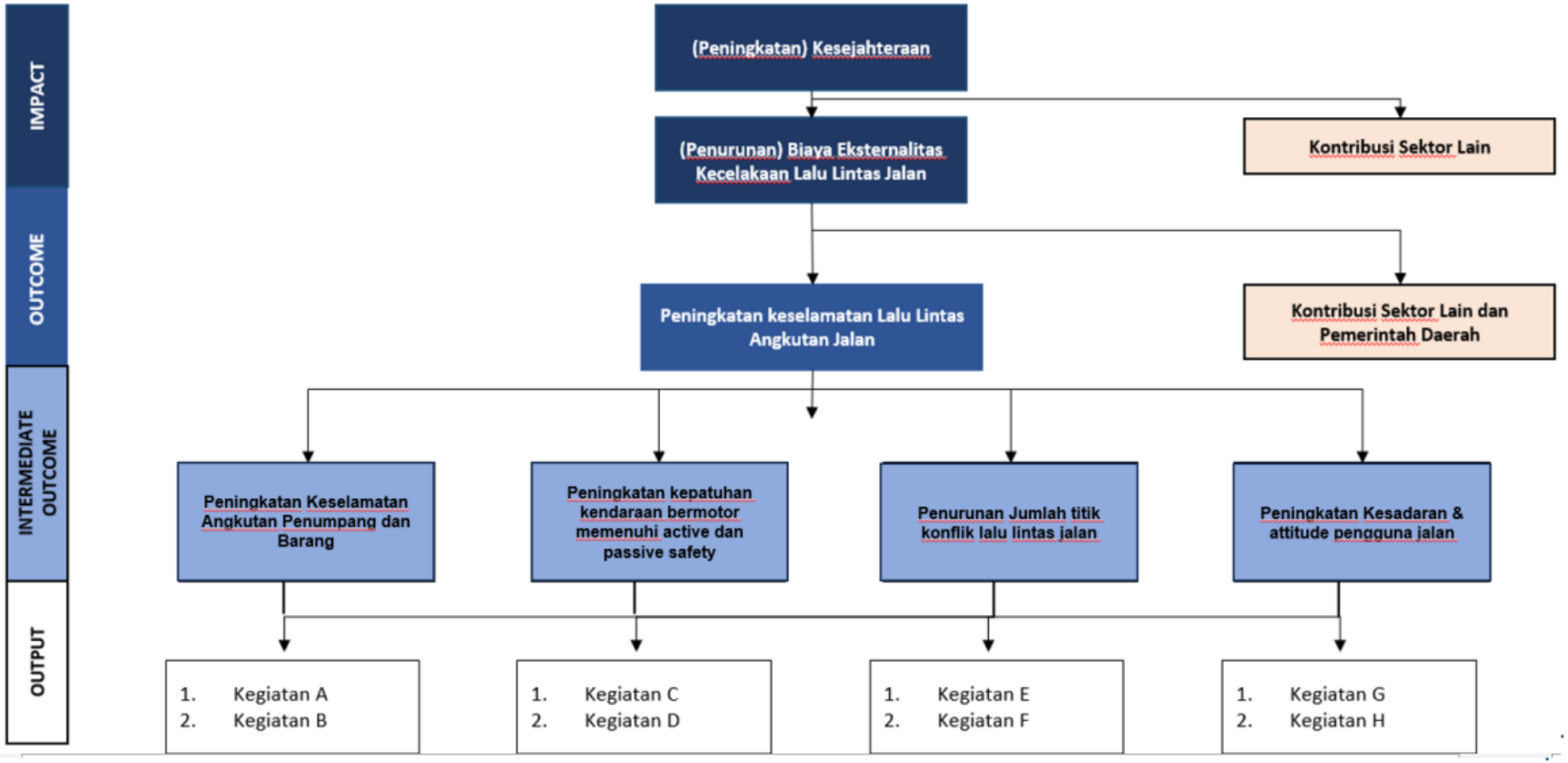

Gambar II. 7 Casecading Indikator Keselamatan LLAJ

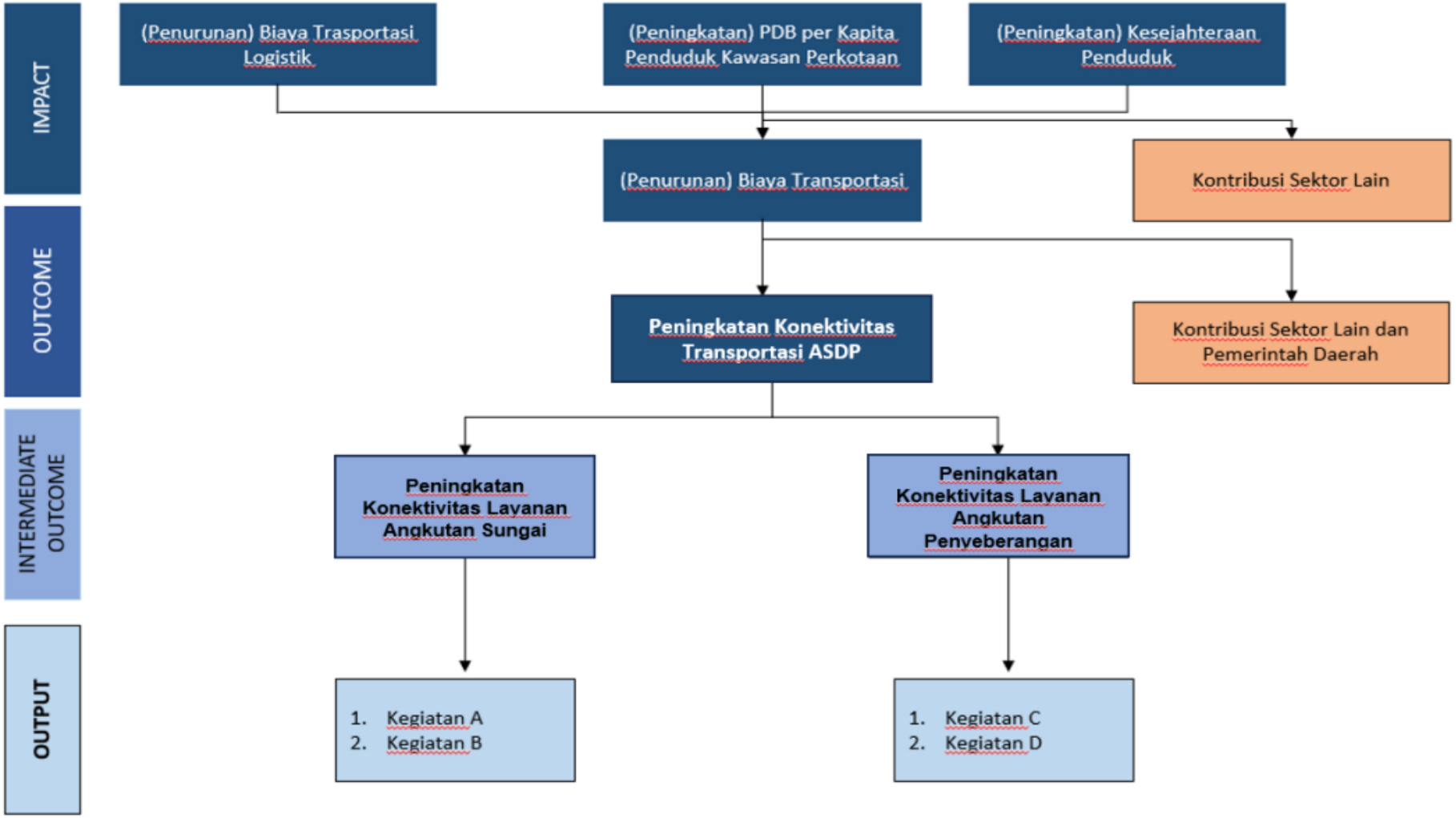

Gambar II. 8 Casecading Indikator Konektivitas Transportasi ASDP

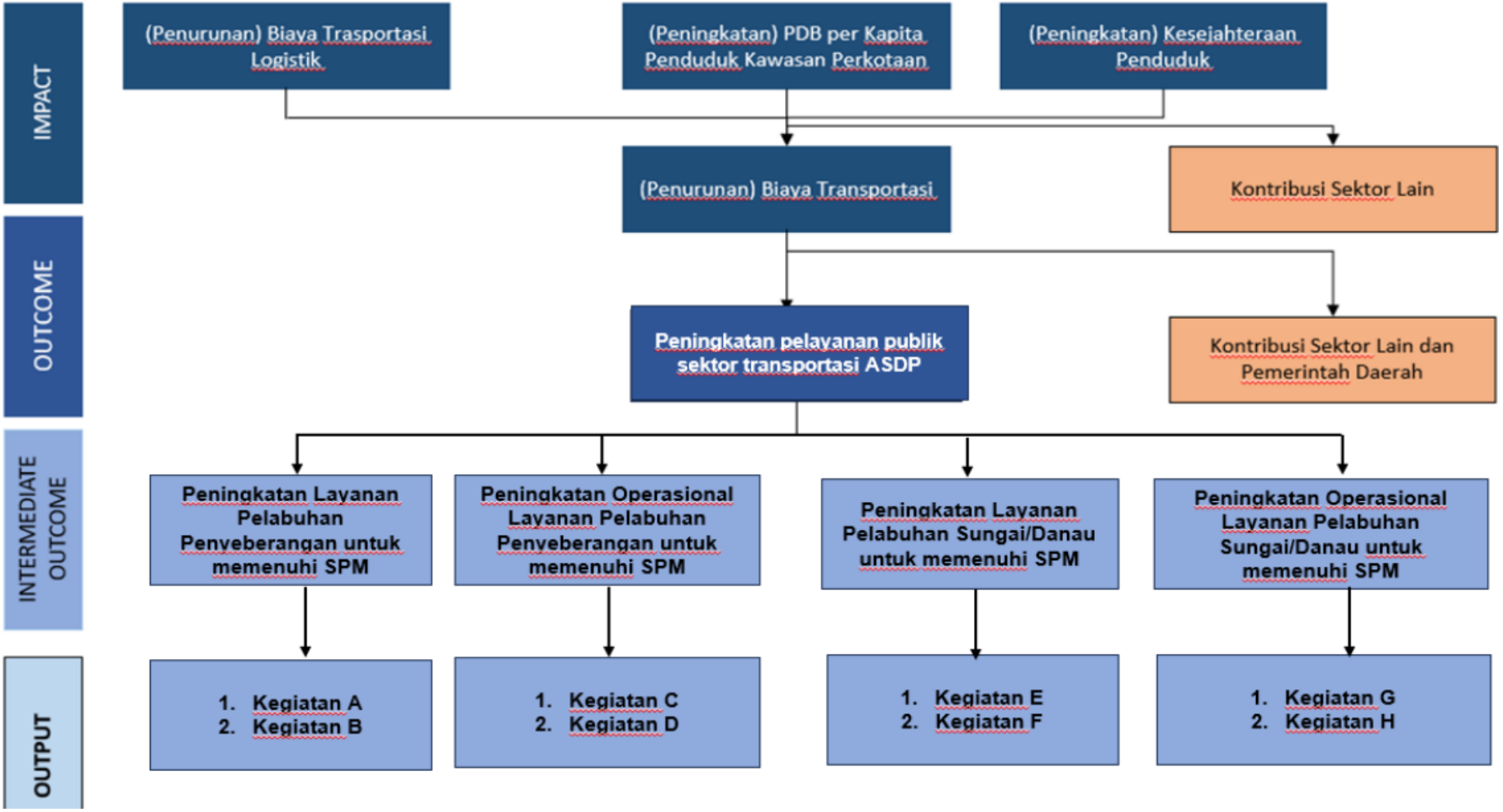

Gambar II. 9 Casecading Indikator Pelayanan Transportasi ASDP

Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard* adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya nilai tambah transportasi darat untuk mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045

   Tujuan ini menjawab *stakeholder perspective* agar penyelenggaraan bidang perhubungan darat mampu memberikan nilai tambah ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai berikut:

   1) Dukungan bidang transportasi darat bagi peningkatan nilai tambah ekonomi adalah sebagai berikut:

      a) Perbaikan kinerja transportasi barang berbasis jalan memberikan manfaat ekonomi berupa penurunan biaya transportasi logistik;

      b) Peningkatan konektivitas bidang transportasi jalan memberikan kontribusi manfaat berupa peningkatan stok infrastruktur;

      c) Pengembangan angkutan umum massal perkotaan memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan kontribusi kawasan perkotaan terhadap PDB Indonesia;

      d) Penyediaan layanan angkutan perintis orang dan barang memberikan manfaat ekonomi berupa peningkatan pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

   2) Dukungan bidang transportasi darat bagi peningkatan nilai tambah sosial adalah sebagai berikut:

      a) Peningkatan kontribusi perhubungan darat untuk menurunkan jumlah kejadian kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas memberikan manfaat sosial berupa penurunan biaya yang ditanggung korban dan keluarga korban akibat kecelakaan lalu lintas jalan;

      b) Pengembangan angkutan umum massal perkotaan memberikan manfaat sosial berupa penurunan biaya transportasi yang ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan.

      c) Dukungan bidang transportasi darat bagi peningkatan nilai tambah lingkungan adalah penurunan emisi GRK yang dihasilkan oleh kegiatan transportasi darat.

3) Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing

Merupakan tujuan untuk menjawab *customer perspectives* agar penyelenggaraan transportasi darat mampu memberikan layanan yang handal, inklusif, dan berdaya saing mencakup aspek:

a) Konektivitas yang Handal

Bidang perhubungan darat mengampu moda angkutan jalan dan penyeberangan. Kedua moda ini memiliki peran strategis untuk membangun konektivitas wilayah daratan dan antar pulau di Indonesia. Peran bidang perhubungan darat ini diarahkan untuk menjalankan fungsi *servicing* atau *ship follows the trade* untuk fasilitasi pergerakan orang dan/atau barang dan *promoting* atau *ship promotes the trade* untuk membuka aksesibilitas wilayah. Moda angkutan jalan memiliki karakteristik untuk melayani pergerakan dari pintu-ke-pintu. Sebaliknya, karakteristik moda angkutan lain adalah melayani pergerakan dari simpul-ke-simpul. Karakteristik ini memberikan peran strategis bagi moda jalan untuk menghubungkan seluruh wilayah daratan dan menjadi layanan lanjutan bagi moda angkutan lain. Sementara itu, karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan mengungkit peran strategis angkutan penyeberangan untuk menyatukan pulau-pulau terdekat yang dipisahkan oleh perairan.

Pengembangan konektivitas transportasi darat dengan memperhatikan peran strategis moda jalan dan penyeberangan diarahkan untuk melayani dan mengungkit perjalanan pada 5 (lima) lokus, yaitu: angkutan perkotaan, angkutan antar kota, angkutan barang, angkutan perintis orang dan barang, serta angkutan penyeberangan. Pengembangan jaringan trayek/lintas untuk menghubungkan antar pusat kegiatan, antara pusat produksi, distribusi, dan konsumsi, antar pulau, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang didukung oleh layanan angkutan yang handal untuk memenuhi kebutuhan perjalanan orang perkotaan dan antar kota, mendukung penurunan biaya transportasi barang, dan mendukung mendukung pemerataan pembangunan.

b) Aksesibilitas yang inklusif

Penyediaan layanan transportasi jalan diarahkan untuk melayani kebutuhan beragam. Layanan transportasi memperhatikan kebutuhan dari kelompok masyarakat dengan keterbatasan fisik (difabel dan lanjut usia), ekonomi, maupun gender (wanita dan ibu hamil/menyusui).

Peningkatan aksesibilitas juga ditujukan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan yang termarginalkan oleh minimnya aksesibilitas wilayah. Afirmasi penyediaan angkutan perintis untuk membuka aksesibilitas wilayah diharapkan mengungkit kegiatan ekonomi dan sosial.

c) Layanan transportasi darat yang berkualitas dan berdaya saing

Guna meningkatkan daya saing transportasi darat, penyediaan layanan transportasi darat perlu memperhatikan kebutuhan perjalanan, baik kualitas dan kuantitas layanan. Layanan angkutan darat memiliki kualitas prima yang mencakup kehandalan, kenyamanan, terjangkau, dan tepat waktu. Selain itu, penyediaan layanan angkutan darat secara kuantitas memperhatikan kebutuhan perjalanan dan kenyamanan pengguna layanan.

d) Keselamatan transportasi darat

- Masih tingginya jumlah kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan menjadi tantangan utama bidang transportasi darat. Penanganan masalah kecelakaan lalu lintas dalam RUNK LLAJ menggunakan pendekatan lima pilar keselamatan LLAJ.

- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memiliki peran penting dalam pelaksanaan RUNK LLAJ sebagai koordinator Pilar 3 (Kendaraan yang Berkeselamatan) maupun instansi penanggung jawab dan pendukung pada Pilar 1 (Sistem yang Berkeselamatan), Pilar 2 (Jalan yang Berkeselamatan), dan Pilar 4 (Pengguna Jalan yang Berkeselamatan). Pelaksanaan peran di atas diharapkan mampu meningkatkan kontribusi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bagi penurunan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Lokus penyelenggaraan transportasi darat untuk mendukung terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
- Penyelenggaraan Angkutan Antar Kota;
- Penyelenggaraan Angkutan Barang;
- Penyelenggaraan Angkutan Perintis Orang dan Barang;
- Penyelenggaraan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan

- Peningkatan Keselamatan dan Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e) Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi darat yang berkualitas (T.3) merupakan tujuan pada level internal business

Tujuan ini berkaitan dengan proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang perhubungan darat untuk mengembangkan konektivitas dan layanan transportasi darat.
Pemenuhan perspektif internal business perlu difokuskan pada pelaksanaan peran dalam penyusunan rencana induk dan pelaksanaan program/kegiatan yang lintas direktorat yang didukung oleh SDM internal perhubungan darat yang kompeten. Salah satu rencana induk yang lintas direktorat adalah Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau RIJ LLAJ. RIJ LLAJ menjadi salah satu amanat UU No.22 Tahun 2009 yang penting dan mendesak untuk diundangkan dan menjadi acuan bagi perencanaan pada bidang angkutan jalan.

f) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif (T.4) merupakan tujuan pada level learning and growth

Tujuan ini berkaitan dengan penyediaan sumber daya internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar mampu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan transportasi secara efektif. Sumber daya yang menjadi input bagi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perhubungan mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan SDM aparatur, regulasi, sistem informasi dan teknologi, serta sarana bantu kerja yang memadai.
Pengembangan sistem informasi layanan perhubungan darat menjadi isu strategis pada bidang perhubungan darat. Digitalisasi penyelenggaraan LLAJ dilakukan dengan pengembangan sistem informasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja transportasi jalan berbasis data yang aktual.

2.3.2. Tujuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Tujuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 menggunakan pendekatan *balanced scorecard* atau BSC. Penggunaan *balanced scorecard* mengacu pada pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Pendekatan *balanced scorecard* membagi proses kerja pada Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ke dalam 3 (tiga) perspektif sebagaimana disajikan pada **Gambar II.10** adalah sebagai berikut:

a. *Customer Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan penerima layanan *(customer)* pengujian tipe kendaraan bermotor berupa hasil atau outcome dari penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor sesuai lingkup tugas pokok dan fungsi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor;

b. *Internal Business Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam proses penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor yang diwujudkan melalui perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dalam penyediaan sarana dan prasarana pengujian tipe sesuai dengan regulasi nasional dan internasional (UN Regulation) maupun pengembangan SDM yang berkualitas;

c. *Learning and Growth Perspectives* menjawab perspektif atau kepentingan internal Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam penyediaan input/masukan bagi jalannnya organisasi berupa penyediaan SDM internal yang handal dan berkualitas, pendanaan, pengelolaan data dan informasi, perlengkapan kerja, dan sarana dan prasarana yang dikelola sesuai prinsip *good governance*.

Tabel II. 2 Indikator Tujuan Balai pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029

PERSPEKTIF		TUJUAN		INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN
CUSTOMER PERSPECTIVE (*Core Business*)	T.1	Terwujudnya BPLJSKB sebagai Lembaga pengujian tipe yang adaptif, mandiri, profesional, dan berintegritas	IKT.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	
			IKT.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	
			IKT.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan	Kegiatan	
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE (*Technical Support*)	T.2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Uji Tipe yang Terakreditasi 17025 sesuai standar Internasioanl, mengikuti ruang lingkup pada ASEAN MRA	IKT.4	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	%	
			IKT.5	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Unit	
			IKT.6	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Kegiatan	
			IKT.7	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	%	
			IKT.8	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Unit	
			IKT.9	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Unit	
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (*Management Support*)	T.3	Terwujudnya *Good Governance* dan memiliki fleksibiltas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat	IKT.10	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Transportasi Darat pada BPLJSKB	%	
			IKT.11	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	
			IKT.12	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	
			IKT.13	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	
			IKT.14	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Kegiatan	
			IKT.15	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	

PERSPEKTIF		TUJUAN		INDIKATOR	SATUAN	KETERANGAN
			IKT.16	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan	
			IKT.17	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	
			IKT.18	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	
			IKT.19	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	

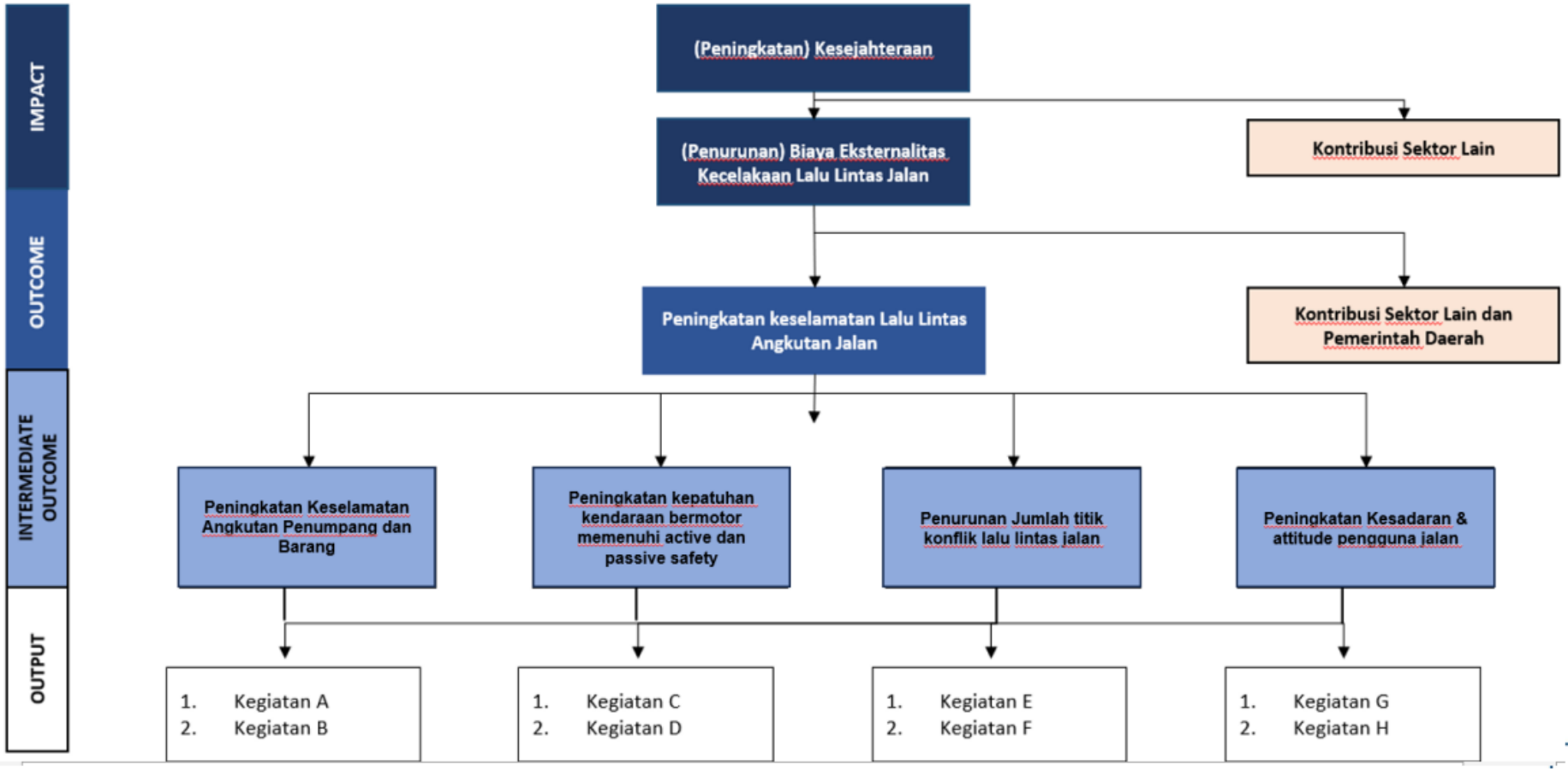

Gambar II. 10 Cascading Keselamatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Tujuan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 yang dirumuskan dengan menggunakan pendekatan *balanced scorecard* adalah sebagai berikut:

a. Terwujudnya BPLJSKB sebagai lembaga pengujian tipe yang adaptif, mandiri, profesional, dan berintegritas;

   Merupakan tujuan untuk menjawab *customer perspectives* agar penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta mampu memberikan layanan yang handal, inklusif, dan berdaya saing dengan dukungan kegiatan sebagai berikut:

   1) Inovasi layanan baik berupa penambahan jenis jasa layanan maupun pengembangan *Prototype* teknologi kendaraan bermotor;
   2) Melaksanakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Laboratory Practice.*

b. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Uji Tipe yang Terakreditasi 17025 sesuai standar Internasional, mengikuti ruang lingkup pada ASEAN MRA;

   Tujuan ini berkaitan dengan proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe. Tujuan untuk menjawab *internal business process perspective* dapat dicapai melalui:

   1) Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe yang berstandar Internasional;
   2) Peningkatan *capacity building* pegawai untuk melakukan pengujian tipe sesuai dengan regulasi UN-R.

c. Terwujudnya Terciptanya *Good Governance* dan memiliki fleksibiltas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat.

   Tujuan ini untuk menjawab *learning and growth perspective* yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya internal di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor agar mampu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pelayanan pengujian tipe secara efektif dan efisien. Sumber daya yang menjadi input bagi pelaksanaan program/kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mencakup penyusunan kerangka pendanaan (RM dan BLU), pendapatan BLU, kelembagaan dan SDM aparatur, sistem informasi dan teknologi pengujian tipe, serta sarana bantu kerja yang memadai.

   Pengembangan sistem informasi pelayanan pengujian tipe berupa digitalisasi harus dilakukan dengan pengembangan sistem informasi atau integrasi sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja berbasis data yang aktual.

2.4 Sasaran Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

2.4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

SP1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat;

SP2. Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat;

SP3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;

Tabel II.3 menyajikan tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029. Sementara itu, sasaran dan indikator kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat disajikan pada Tabel II.4.

Tabel II. 3 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029

Tujuan	Sasaran Program	Penjelasan	Indikator Kinerja Program
T.1 Terwujudnya transportasi darat yang handal, inklusif, dan berdaya saing	SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat	Konektivitas transportasi darat mengacu pada perbaikan dan perluasan jaringan transportasi jalan raya dan ASDP serta sistem pendukung lainnya yang memungkinkan pergerakan orang dan barang antarwilayah menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi	1. IKP1.1. Ratio Konektivitas transportasi Jalan 2. IKP1.2 Ratio Konektivitas transportasi ASDP
	SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat	kinerja pelayanan transportasi darat merujuk pada perbaikan kualitas, efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan transportasi jalan raya dan ASDP yang digunakan oleh masyarakat umum maupun sektor logistik. Kinerja ini mencerminkan sejauh mana sistem transportasi darat mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal dan berkelanjutan.	1. IKP 2.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi Jalan 2. IKP 2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Transportasi ASDP
	SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	Keselamatan lalu lintas angkutan jalan merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap manusia, kendaraan, dan infrastruktur	IKP 3 : Persentase Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan
T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.	SPp6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Mengukur sejauh mana Kementerian Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sektor transportasi, yang tercermin melalui berbagai instrumen evaluasi internal dan eksternal.	IKP 4 : Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub

Tabel II. 4 Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No	INDIKATOR		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
1	**IKP1.1**	**Ratio Konektivitas transportasi Jalan (RKTJ)**	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi jalan, yaitu angkutan umum penumpang dan barang , terminal Tipe A ,Terminal Barang, dengan AKAP, Angkutan Perintis dan Angkutan Barang	**RKTJ = (RKPP+RKDTPK+RKSPN+ RKAKAP+RKAB)/5** a. **RKPP :** Ratio Beroperasinya layanan angkutan umum massal perkotaan (Jumlah Kota atau Kawasan PKN sesuai PP NOMOR 13 TAHUN 2017 yang dilayani oleh BRT/BTS) RKPP =KC / KPKN KC : Kota yang tercover BTS atau BRT pusat dan Pemda KPKN : Jumlah PKN (12 Kawasan perkotaan, 51 (43 PKN+Ibukota dan 8 KOta Jabodetabek (non Jakarta) b. **RKDTPK :** Ratio Layanan angkutan perintis untuk melayani wilayah DTPK (Jumlah DTPK yang dilayani oleh layanan Subsidi dibagi dengan Jumlah DTPK sesuai Peraturan yang dapat dilayani sesuai Perpres 63 Tahun 2020 dan Perpres 118 Tahun 2022) RKDTPK =KP / KDTPK KP : DTPK terlayani Perintis KDTPK : Jumlah DTPK yang BISA terlayani perintis sesuai Perpres **RKSPN :** Rasio beroperasinya layanan angkutan pada Pusat Kegiatan Startegis dan atau pedesaan antar provins (Jumlah KSPN,KI yang dilayani dibagi dengan Jumlah KSPN dan KI sesuai Ketentuan) RKKSPN =KS / KSPN KS : KSPN,KI terlayani layanan KSPN : Jumlah KSPN yang BISA terlayani perintis sesuai Perpres d. **RKAKAP : Rasio** beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas (Jumlah terminal yang dioperasikan terhadap rencana pengembangan Terminal Tipe sesuai Ketentuan Menteri **RKAKAP :** Jumlah terminal Tipe A yang beroperasi / Rencana kebutuhan terminal e. **RKAB :** Rasio beroperasinya layanan terminal Barang untuk mendukung konektivitas (Jumlah terminal barang yang dioperasikan terhadap rencana pengembangan Terminal barang dalam 5 Tahun)	1. RKTJ a. Tahun 2024 : 0.426 b. Tahun 2025 : 0,444 c. Tahun 2029 : 0,606 2. RKPP 2024 : 25 kota BTS-BRT / 63 PKN+Kawasan 3. RKTDP : DTPK yang BISA terlayani perintis sesuai Perpres = 68 Kab/Kota dan DTPK terlayani 2024 sesuai SK = 17 Kab/Kota 4. RKKSPN : Baseline 2024 : Jumlah kawasan dilayani 15 dari 89 Kawasan 5. RKAKAP : Base line, 2024 : 121 Terminal dari target 142 Terminal Rencana Pembangunan = 5 Terminal 6. RKAB : Baseline 2024 : 6 dari 13 Terminal 2029 : 13 bh dari 13	1. IKP ini merupakan akumulasi dari IKK dibawah yang merupakan bagian dari beberapa IKK eselon 2, secara umum IKP ini sdh dapat mengakomodir pembangunan Simpul baru sampai dengan beroperasi. Penjelasan lanjut ada di setiap IKK 2. RKPP : Base Line 2024 : 25 dari 63 2025 : 26 dari 63 , 2026 : 28 dari 63, 2027 : 34 dari 63 , 2028 : 37 dari 63, 2029 : 38 dari 63 kota 3. RK DTPK Base Line 2025 : 17 , 2026 : 17, 2027 : 21, 2028 : 23, 2029 : 23 dari 68 DTPK 4. RK KSPN : 2025 : 15 , 2026 : 15, 2027 : 16, 2028 : 17, 2029 : 18 dari 89 KSPN,KI 5. RKAKAP : 2025 = 121, 2026 = 121 , 2027 =124, 2028 = 126, 2029 = 126 dari 142 Terminal 6. RKAB : 2025 = 7 2026 = 0 , 2027 =0, 2028 = 0, 2029 = 13 Catatan : RKPP, RKDTPK,RKKSN,RKAKAB,RKAB bisa menjadi IKK di Tingkat eselon 2 tetapi tidak membatasi eselon 2 untuk memiliki IKK konektivitas yang lain selama dapat mendukung IKP eselon 1 secara umum.

No	INDIKATOR		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
2	**IKP1.2**	**Ratio Konektivitas transportasi ASDP (RKASDP)**	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi ASDP, yaitu Pelabuhan Penyeberangan dan Pelabuhan SD.	**RKASDP = (RKAP+RKASD)/2** **a. RKAP :** Ratio konektivitas jaringan transportasi Angkutan Penyeberangan (tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi Penyeberangan dengan Pelabuhan Penyeberangan yang beroperasi) RKPP : JPPTO/JPPRIPN JPPTO : Jumlah pelabuhan penyeberang yang telah terbangun dan operasional melayani JPPRIPN : Jumlah total pelabuhan penyeberangan sesuai RIPN **b. RKASD :** Ratio konektivitas jaringan transportasi Angkutan SD (Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat keterhubungan antarwilayah melalui jaringan transportasi PASD dengan Dermaga ASD yang beroperasi) RKASD = JPASD/JPSRIPN JPASD = Jumlah pelabuhan sungai yang telah terbangun dan operasional melayani JPSRIPN = Jumlah total pelabuhan sungai sesuai RIPN	1. RKASDP a. Tahun 2024 : 0.565 b. Tahun 2025 : 0,570 c. Tahun 2029 : 0,573 2. RKAP Baseline 2024 Operasi Pelabuhan 234 buah Jumlah Pelabuhan dalam RIPN : 467 buah 3. RKASD : Baseline 2024 Operasi Pelabuhan 615 buah Jumlah Pelabuhan dalam RIPN : 978 buah	1. IKP ini merupakan akumulasi dari IKK dibawah yang merupakan bagian dari beberapa IKK eselon 2, secara umum IKP ini sdh dapat mengakomodir pembangunan Simpul baru, Pembangunan Kapal untuk Simpul tersebut sampai dengan beroperasi ASDP 2. RKAP : 2025 :3, 2026 : 2, 2027 : 0, 2028 : 0, 2029 : 1 3. RKASD : 2025 :3, 2026 : 0, 2027 : 0, 2028 : 0, 2029 : 0
2	**IKP 2**	**Peningkatan Kinerja Layanan Transportasi Darat**	Kinerja layanan Transportasi darat di ukur dengan persepsi, harapan, dan tingkat kepuasan penumpang terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara transportasi	IKMTD : (IKMTJ+IKMASDP) /2 IKMTJ : Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk Transportasi Jalan IKMASDP: Indeks Kepuasan Masyarakat Untuk Transportasi ASDP	1. IKM diukur melalui survei sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Target 2025 :96,47 dan 2029 : 97	**Target :** 2025 : 96,47, 2026 :96,55, 2027 :96,70, 2028 : 96,90 , 2029 : 97
3	**IKP 3**	**Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan**	Keselamatan lalu lintas angkutan jalan merujuk pada upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap manusia, kendaraan, dan infrastruktur	100% - Jumlah kejadian kecelakaan per 10,000 jumlah kendaraan di Indonesia Kategori Kecelakaan adalah Data Kecelakaan yang dirilis resmi oleh Kepolisian atau lembaga resmi lainnya sehingga tidak hanya terkait Fatalitas tetapi Kecelakaan yang tanpa fatalitas tetapi menyebabkan kerugian ekonomi secara regional atau melibatkan masyarakat setempat	Baseline 2024 : 150.906 Kec : 166.632.052 Kend Tahun 2025 : Kec turun 2% : Kend : Naik 6,69% Tahun 2026 : Kec turun 10% : Kend : Naik 6,69% Tahun 2027 : Kec turun 20% : Kend : Naik 6,69% Tahun 2028 : Kec turun 20% : Kend : Naik 6,69% Tahun 2029 : Kec turun 20% : Kend : Naik 6,69%	1. Baseline 2024 : 90,94% Tahun 2025 : 91,70% Tahun 2026 : 92,58% Tahun 2027 : 94,11% Tahun 2028 : 95,32% Tahun 2029 : 96,28% 2. Jumlah Kecelakaan menggunakan data yang dikeluarkan resmi oleh Kepolisian RI atau yang telah dirrilis di Media Sosial yang terpercaya 3. Jumlah jumlah kendaraa menggunakan data yang telah dirrilis di Media Sosial yang terpercaya 4. Apabila perhitungan evaluasi setaip tahun, belum adanya data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, untuk sementara menggunakan data target dalam Resntra sampai adanya data resmi yang disampaikan.

No	INDIKATOR		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
4	**IKP4**	**Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub**	Indikator ini mengukur sejauh mana Kementerian Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sektor transportasi, yang tercermin melalui berbagai instrumen evaluasi internal dan eksternal.	Indeks ini diukur oleh Menpan pada Kementerian Perhubungan sehingga nilai indeks menggunakan nilai IRB Kementerian Perhubungan	Baseline 2024 : 90,84, 2029 : 91,3, Nilai Target dtetapkan oleh Biro SDMO	Dievaluasi terhadap Kementerian Perhubungan setiap akhir Tahun oleh Menpan RB. Nilai Ditjen Darat diasumsi sama dengan Kemenhub untuk mempermudah penilaian karena tidak dilakukan evaluasi terpisah oleh Itjen dan Menpan RB

2.4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Sasaran Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

SK2.1 Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi jalan;

SK3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*;

SK4 Mendukung peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat;

Tabel II.5 menyajikan tujuan dan sasaran kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029. Sementara itu, sasaran dan indikator kinerja kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor disajikan pada Tabel II.6

Tabel II. 5 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029

Tujuan	Sasaran Kegiatan	Penjelasan	Indikator Kinerja Kegiatan
T.1 Terwujudnya BPLJSKB sebagai lembaga pengujian tipe yang adaptif, mandiri, profesional, dan berintegritas	SK2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	Pelayanan publik sektor transportasi jalan merujuk pada perbaikan kualitas, efisiensi, keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan transportasi jalan. Pelayanan publik ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan terus berinovasi demi kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan.	IKK 2.1.1 Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya IKK 2.1.2 Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya IKK 2.1.3 Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe IKK 2.1.4 Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian IKK 2.1.5 Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe IKK 2.1.6 Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang
T.2 Terciptanya Peningkatan Pelayanan Uji Tipe yang Terakreditasi 17025 sesuai standar Internasional, mengikuti ruang lingkup pada ASEAN MRA	SK3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*	Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety* merupakan sasaran kegiatan pemerintah di bidang transportasi darat dengan memastikan kelaikan teknis kendaraan, termasuk fungsi sistem keselamatan aktif dan pasif yang disyaratkan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan lalu lintas, serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap manusia, kendaraan, dan infrastruktur	IKK 3.2.1 Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor IKK 3.2.2 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman IKK 3.2.3 Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor
T.3 Terwujudnya Terciptanya *Good Governance* dan memiliki fleksibiltas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktifitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat	SK.4 Mendukung Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub/Ditjen Perhubungan Darat	Mengukur sejauh mana Kementerian Perhubungan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sektor transportasi, yang tercermin melalui berbagai instrumen evaluasi internal dan eksternal.	IKK 4.1 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKK 4.4 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) IKK 4.6 Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan IKK 4.7 Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat IKK 4.10 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat

Tabel II. 6 Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
1	IKK 2.1.1	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Indikator yang menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya dihitung berdasarkan jumlah realisasi Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya terhadap target Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya yang telah ditentukan	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya = Realisasi Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
2	IKK 2.1.2	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Indikator penunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat berupa proses kalibarasi dan verifikasi peralatan pengujian kendaraan bermotor. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan. Indikator Kinerja Kegiatan Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya dihitung berdasarkan realisasi jumlah kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya terhadap target kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan.	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya = Realisasi Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
3	IKK 2.1.3	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Merupakan Indikator yang bertujuan untuk mendukung kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor kegiatan yang akan dilaksanakan baik berupa sistem, metode, maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe dihitung berdasarkan jumlah realisasi Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe terhadap target Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe diharapakan mampu membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe = Realisasi Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
4	IKK 2.1.4	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menunjang	Tahapan bobot: Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi 20	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
			Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Peningkatan Kualitas Layanan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi layanan kepada pengguna jasa. Inovasi yang dilakukan oleh BPLJSKB merupakan inovasi baik menggunakan teknologi informasi maupun berupa penyempurnaan bisnis proses/tata kelola BLU, layanan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang dirasakan langsung dampaknya kepada pengguna jasa BPLJSKB	Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan 25 Inovasi layanan dalam tahap uji coba 25 Inovasi layanan sudah diluncurkan/diterapkan, meski belum secara penuh 30 Inovasi layanan sudah diluncurkan/diterapkan secara penuh 20 Inovasi layanan sudah berdampak pada peningkatan layanan 30		disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
5	IKK 2.1.5	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe berupa pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan pengujian tipe atau penunjang pengujian tipe. Selain itu, Indikator pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe bertujuan untuk meningkatkan fasilitas sarana layanan pengujian tipe sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe diukur berdasarkan jumlah realisasi Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini diharapakan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe.	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe = Realisasi Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
6	IKK 2.1.6	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan berupa pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan penunjang. Selain itu, Indikator pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang operasional perkantoran. Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang diukur berdasarkan jumlah realisasi Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini diharapakan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe.	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang = Realisasi Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
7	IKK 3.2.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Merupakan indikator yang mengukur kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan pengujian yang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan realisasi Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap target Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor = Realisasi Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
8	IKK 3.2.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian hasil pembuatan dan/atau perakitan rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan terhadap data rancang bangun yang diajukan oleh perusahaan karoseri sebelum dioperasikan di jalan. Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman diukur berdasarkan realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman terhadap target Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman = Realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
9	IKK 3.2.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	Indikator Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor merupakan kegiatan pematauan dan evaluasi terhadap pelayanan pengujian tipe yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor diharapakan mampu membantu kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor = Realisasi Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
10	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Merupakan Indikator yang mencerminkan kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) = Realisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
11	IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Merupakan indikator yang berisi kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) = Realisasi Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
12	IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran = Realisasi Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
13	IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Indikator Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) merupakan Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) = Realisasi Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
14	IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) merupakan kegiatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK yang menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) = Realisasi Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
15	IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan = Realisasi Kegiatan Pengawasan Kearsipan	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
16	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Selain itu, menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) = Realisasi Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
17	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Merupakan standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor). Kegiatan indikator Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat berupa pengembangan kompetensi SDM, motivasi pegawai dan termasuk kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat = Realisasi Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
17	IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan.	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat = Realisasi Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
17	IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Merupakan alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat = Realisasi Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

BAB III
ARAH KEBIJAKAN BALAI PENGUJIAN LAIK JALAN DAN SERTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Arah Kebijakan menurut Permen PPN/Kepala Bappenas No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Hasil identifikasi diperoleh 9 (sembilan) isu strategis pada bidang perhubungan darat sebagai berikut:

a. Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik;
b. Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan;
c. Konektivitas wilayah daratan;
d. Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK;
e. Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan;
f. Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
g. Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil;
h. Penanganan kendaraan barang ODOL; dan
i. Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.

Arah kebijakan untuk menjawab isu strategis bidang perhubungan darat dan arahan Prioritas Nasional dan indikasi kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Astacita pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Tabel III. 1 Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
Kontribusi angkutan barang berbasis jalan terhadap penurunan biaya logistik	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Penguatan Infrastruktur Konektivitas & Sarana Penunjang Logistik b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita: - Pendukung Asta Cita 3: Pembangunan Terminal Barang Moda Jalan; - Pendukung Asta Cita 5: Penetapan jaringan lintas angkutan barang yang mengakses kawasan industri/produksi ke simpul outlet dan jaringan distribusi nasional dan Pelaksanaan MRLL dan MKLL pada jaringan lintas angkutan barang dan koridor utama nasional.	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang
Rendahnya modal share angkutan umum perkotaan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 5: Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 6: Buy The Service (BTS) BRT Perkotaan	Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan
Konektivitas wilayah daratan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ) - Pendukung Asta Cita 3: Penyelenggaraan Layanan Angkutan Multimoda pada KSPN yang menghubungkan bandara dengan pelabuhan penyeberangan	Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan
Afirmasi penyediaan angkutan perintis jalan (orang dan barang) untuk membuka aksesibilitas DTPK	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan Terminal Barang Internasional di wilayah perbatasan - Pendukung Asta Cita 6: Penyelenggaraan angkutan keperintisan moda jalan dan PSO angkutan barang.	Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

Isu Strategis	Arahan Prioritas Nasional & Indikasi Kegiatan Kemenhub Pendukung Asta Cita	Arah Kebijakan
Angkutan Penyeberangan sebagai jembatan penghubung dua pulau berdekatan yang dipisahkan oleh perairan	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan: - Pendukung Asta Cita 2: Pembangunan/rehab/pengembangan pelabuhan TSDP (termasuk pelabuhan Ro-Ro), Pembangunan Halte Sungai yang menghubungkan kawasan yang tidak dapat dijangkau dengan moda transportasi angkutan jalan; dan Pengembangan dan penetapan lintas komersil maupun perintis penyeberangan di kawasan timur - Pendukung Asta Cita 5: Pembangunan/revitalisasi/peningkatan pelabuhan SDP pada kawasan prioritas	Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau
Kontribusi pada peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	a. Asta Cita/Prioritas Nasional 3: Penguatan Konektivitas Darat & Keselamatan LLAJ b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 3: Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan nasional dan DAK Fisik Keselamatan Jalan (untuk penanganan perlengkapan Jalan Daerah).	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
Ketergantungan angkutan jalan pada bahan bakar fosil	a. Kegiatan prioritas pada Asta Cita/Prioritas Nasional 2: Peningkatan Transportasi Hijau Berkelanjutan b. Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 2: Insentif elektifikasi kendaraan bermotor umum, Pemanfaatan bahan bakar alternatif pada angkutan penumpang dan barang berbasis jalan, Pemanfaatan tenaga surya dan/atau elektrifikasi operasional sarana prasarana transportasi, Implementasi regulasi uji tipe/berkala kendaraan, dan Pemanfaatan Bio Diesel untuk Angkutan Jalan	Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Penanganan kendaraan barang ODOL	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penuntasan ODOL pada angkutan barang moda jalan (termasuk optimalisasi jembatan timbang)	Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus
Kebutuhan sistem informasi yang menyediakan data aktual LLAJ.	Indikasi Kegiatan Kementerian Perhubungan Pendukung Asta Cita 7: Penyederhanaan dan pengintegrasian sistem informasi di lingkungan Kementerian Perhubungan	Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja

Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang;

AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan

AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan

AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan

AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau

AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan

AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus

AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja

AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi

AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul

AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelengaraan transportasi

AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

Penyelarasan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 untuk menjawab Sasaran Program yang diturunkan dari *balanced scorecard* disajikan pada **Tabel III.2.** Dengan memperhatikan kesamaan lokus, Sasaran program meningkatnya konektivitas transportasi darat (**SP.1**) dan kinerja pelayanan transportasi darat (**SP.2**) digabungkan untuk dijawab oleh satu arah kebijakan pada masing-masing lokus bidang perhubungan darat. Masing-masing arah kebijakan di atas diuraikan menjadi Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029.

Tabel III. 2 Sasaran Program, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat	AK.1 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Biaya Transportasi Barang	Meningkatkan konektivitas antara gateway (pelabuhan & bandar udara), kawasan industri, dan pusat logistik/terminal barang sebagai pusat konsolidasi/ distribusi
SP.2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat		Meningkatkan kelancaraan arus barang untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama pulau
	AK.2 Peningkatan Pengguna Angkutan Perkotaan di Kawasan Perkotaan Metropolitan	Meningkatkan coverage area angkutan perkotaan dengan integrasi jaringan angkutan umum massal perkotaan yang door-to-door dan seamless
		Meningkatkan panjang perjalanan angkutan umum perkotaan sebagai moda prioritas
		Menurunkan panjang perjalanan kendaraan pribadi di kawasan perkotaan
	AK.3 Peningkatan Layanan Angkutan Antar Kota untuk Mewujudkan Konektivitas Wilayah Daratan	Meningkatkan konektivitas antar terminal penumpang Tipe A pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan pada KEK, KSN, dan KI
		Meningkatkan jumlah penumpang angkutan antar kota dan antar moda
		Meningkatkan kelancaraan lalu lintas pada koridor utama pulau
	AK.4 Peningkatan Aksesibilitas bagi Pemerataan Pembangunan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan	Meningkatkan aksesibilitas Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK)
		Menurunkan biaya angkutan barang berbasis jalan dari/ke pelabuhan menuju hinterland di wilayah DTPK
	AK.5 Peningkatan Layanan Angkutan Penyeberangan sebagai Jembatan Konektivitas Antar Pulau	Meningkatkan kapasitas lintas angkutan penyeberangan komersial dan perintis
		Meningkatkan jumlah kendaraan yang diangkut dengan angkutan penyeberangan komersial

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SP.3 Meningkatnya keselamatan transportasi darat	AK.6 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat untuk Menurunkan Fatalitas Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	Menurunkan paparan risiko perjalanan lalu lintas jalan
		Menurunkan jumlah konflik lalu lintas jalan
		Meningkatkan kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan
		Meningkatkan pemenuhan active & passive safety pada kendaraan yang turun ke jalan
		Meningkatkan kesadaran & attitude pengguna jalan berkeselamatan
		Meningkatkan tata kelola pelaksanaan rencana aksi keselamatandan kemitraan keselamatan lalu lintas jalan
	AK.7 Peningkatan Kontribusi Perhubungan Darat dalam Konversi Konsumsi Bahan Bakar Fosil Menuju Bahan Bakar Ramah Lingkungan	Menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor
		Menurunkan emisi gas rumah kaca LLAJ
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
	AK.8 Peningkatan Kepatuhan Dimensi dan Muatan dengan Fokus pada Angkutan Barang Khusus	Meningkatkan kepatuhan dimensi dan muatan pada angkutan barang khusus (tidak berbahaya dan berbahaya) dengan didukung pengawasan operasional secara digital
SPp4 Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi darat	AK.9 Pengembangan Actual Data LLAJ sebagai Instrumen Perencanaan, Pengambilan Kebijakan, dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan kehandalan sistem informasi LLAJ untuk menyediakan Actual Data bagi perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja
	AK.10 Peningkatan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi	Meningkatkan Efektivitas Implementasi Kebijakan Transportasi
SPp5 Meningkatnya SDM transportasi darat yang kompeten	AK.11 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM Perhubungan Darat yang unggul

Sasaran Program	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SPp6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	AK.12 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelengaraan transportasi	Meningkatkan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelengaraan transportasi
	AK.13 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat	Meningkatkan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Ditjen Hubdat

3.1.2 Arah dan Kebijakan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Arah Kebijakan menurut Permen PPN/Kepala Bappenas No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

Hasil identifikasi diperoleh 9 (sembilan) isu strategis pada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

a. Peningkatan kinerja pelayanan pengujian tipe;

b. Regulasi dan kewenangan untuk meningkatkan pelayanan pengujian tipe;

c. Ketersediaan Sumber Daya dalam upaya meningkatkan pelayanan pengujian tipe bertaraf international;

d. Kebutuhan sistem informasi pengembangan data aktual untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja pelayanan pengujian tipe.

Arah kebijakan untuk menjawab isu strategis bidang pengujian tipe dan arahan kebijakan dan strategi implementasi sebagaimana disajikan pada Tabel III.3 Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Tabel III. 3 Sasaran Kegiatan, Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SK 2.1 Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	AK.1 Peningkatan Kinerja pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor	Melakukan pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe yang berstandar Internasional
		Penyediaan laboratorium pengujian yang terakreditasi ISO 17025
		Pengembangan pelayanan pengujian untuk kepentingan pengembangan Prototype teknologi kendaraan bermotor baik untuk akedemisi maupun dengan pihak perakit/pembuat
	AK.2 Peningkatan lingkup pelayanan secara berkesinambungan sesuai kebutuhan pelayanan	Menyusun SOP, bisnis proses, prosedur kerja sebagai dasar penyelenggaraan jasa layanan
		Penguatan kerja sama dan kemitraan terkait pelayanan di BPLJSKB
	AK.3 Pengembangan Actual Data BPLJSKB sebagai instrumen perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi kinerja	Pengembangan aplikasi VTTC untuk kehandalan sistem informasi pengujian tipe BPLJSKB
SK 3.2 Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety		Penerapan Sistem Manajemen yang Terintegrasi *(Integrated Management System)*
SK 4 Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	AK.4 Peningkatan kepatuhan terhadap hasil pengawasan dan pemeriksaan	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LHP BPK tepat waktu
		Optimalisasi layanan PPID yang transparan dan responsif
	AK.5 Pemenuhan kebutuhan dan kompetensi SDM BPLJSKB yang unggul	Peningkatan integritas pegawai BPLJSKB melalui *building integrity*
		Peningkatan capacity building pegawai BPLJSKB untuk melakukan pengujian tipe sesuai dengan regulasi UN-R
	AK.6 Menjalankan organisasi dengan tata kelola keuangan yang mandiri dan profesional	Memaksimalkan penerimaan BLU sehingga meminimalisir beban pembiayaan dari APBN Rupiah Murni
		Peningkatan kualitas perencanaan anggaran dan manajemen kas
		Penguatan pengendalian internal dan kepatuhan regulasi keuangan

3.2 Kerangka Regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Secara umum, kerangka regulasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengacu terhadap Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat serta fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
6. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berikut dengan Unit Organisasi dibawahnya merupakan bagian dari instansi pemerintah yang harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan lain sebagainya.

Regulasi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara spesifik juga mengacu kepada:

1. Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan jalan mengacu pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya;
2. Penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana sistem lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan mengacu pada UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya;
3. Penyelenggaraan serta peningkatan keterpaduan sistem antarmoda mengacu pada PP No 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan peraturan pelaksanaannya.

Kebutuhan penguatan kerangka regulasi, dalam hal ini adalah berupa penetapan/perubahan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat, akan berasal dari 2 alasan mendasar, yakni: (1) yang bersifat *mandatory*, dalam rangka pemenuhan terhadap mandat dari UU/PP terkait agar disusun pengaturan lebih detail/lanjut pada peraturan yang lebih rendah, (2) yang bersifat *complementary*, dalam rangka melengkapi pengaturan teknis pelaksanaan suatu aktivitas dalam penyelenggaraan bidang transportasi darat yang membutuhkan kejelasan pengaturan dikarenakan adanya perkembangan kondisi lapangan maupun lingkungan strategis yang berpengaruh. Selanjutnya, sesuai dengan fungsinya, suatu regulasi (NSPK) dapat memiliki 3 fungsi utama, yakni: (1) fungsi perubahan, untuk mendukung perubahan konsep/sistem penyelenggaraan trasnportasi darat sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman dan kerangka pengaturan yang ada, (2) fungsi stabilisasi, untuk memberikan kepastian tentang ketentuan teknis dan prosedural/ administratif untuk melaksanakan setiap item kegiatan penyelenggaraan bidang transportasi darat yang diatur dalam UU/PP, dan (3) fungsi fasilitasi, untuk memfasilitasi kebutuhan ataupun peran stakeholders dalam proses maupun hasil penyelenggaraan bidang perhubungan.

Analisis kebutuhan regulasi untuk mendukung implementasi program dan kegiatan strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029:

1. Pengaturan terkait regulasi pendukung transportasi publik sebagai bagian dari pelayanan dasar. Undang-undang sektor transportasi yang ditetapkan pada perioda Tahun 2004-2010 sebagai hasil reformasi, mendorong pelibatan swasta dan pemda dalam penyelenggaraan sektor transportasi. Undang-undang tersebut telah memberikan kemajuan dalam pola kelembagaan dan pendanaan transportasi yang lebih terbuka.

   Namun demikian, sampai saat ini masih terjadi defisit penyediaan infrastruktur dan pelayanan transportasi di kawasan perkotaan maupun antarwilayah, merupakan dampak terbatasnya dukungan pendanaan bagi pembangunan sektor transportasi. Hal ini dikarenakan belum adanya konsentrasi pendanaan pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan pelayanan transportasi, karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak menempatkan transportasi sebagai bagian dari urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.

Pendefinisian transportasi sebagai urusan wajib yang menjadi bagian dari pelayanan dasar dalam Undang-Undang Pemerintahan maupun Undang-Undang setiap moda transportasi diharapkan akan mendukung komitmen pendanaan bagi sektor transportasi yang akan menjamin kehadiran negara dalam memfasilitasi transportasi publik bagi masyarakat miskin perkotaan dan warga DTPK.

2. Pengaturan terkait regulasi pembagian wewenang dalam penanganan permasalahan di sub sektor perhubungan darat. Hal ini dikarenakan belum adanya penentuan wewenang penyelenggaraan yang lebih spesifik antara pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan pelayanan transportasi.

   Pembagian dan pendefinisian lebih lanjut terkait wewenang ini dibutuhkan agar seluruh stakeholder pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menjalankan peran secara maksimal dalam menyelenggarakan layanan transportasi darat. Pembagian dan pendefinisian lebih lanjut terkait wewenang ini juga dilakukan untuk mendukung semangat pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara konkuren, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

3. Pengaturan regulasi pendukung transformasi penerapan teknologi di sektor transportasi. Penyelenggaraan transportasi global akan dihadapkan kepada penetrasi teknologi pada Industry 4.0 yang semakin mendalam sehingga mewujudkan sistem ekonomi dan sosial pada tahap Society 5.0. Penerapan teknologi Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Internet of Things akan merubah secara dramatis wajah sistem transportasi ke depan.

   Kemampuan suatu sektor/negara dalam mendorong transformasi teknologi untuk efisiensi pelayanan merupakan kunci daya saing di persaingan global ke depan. Hal ini juga berlaku untuk sektor transportasi nasional yang diharapkan dapat memanfaatkan fitur-fitur teknologi maju yang tepat guna dalam ekosistem baru yang juga kondusif. Diperlukan regulasi yang mampu mendorong pembaruan penerapan teknologi transportasi yang tepat guna dengan tetap memperhatikan kelayakan investasi, persaingan yang sehat, serta kedaulatan dan kemandirian nasional.

   Penerapan regulasi pendukung percepatan penerapan transportasi ramah lingkungan. Komitmen Indonesia (NDC) untuk mencapai Net Zero Emission di Tahun 2060 harus didukung oleh strategi migrasi penerapan transportasi yang ramah lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa sektor transportasi merupakan penyumbang emisi yang signifikan dan pengkonsumsi energi fossil yang terbesar.

   Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi yang sifatnya insentif/disiinsentif untuk mempercepat migrasi penggunaan energi yang ramah lingkungan serta mendorong penggunaan angkutan umum dan non-motorized. Selain itu, penerapan skema investasi berbasis nilai ekonomi karbon dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan sektor transportasi nasional yang ramah

lingkungan. Hal ini akan memberikan dukungan maksimal terhadap komitmen nasional untuk mewujudkan Net Zero Emission di tahun 2060.

4. Regulasi Pendukung Ekosistem Transportasi Perkotaan di Masa Depan. Integrasi angkutan jalan dalam sistem transportasi perkotaan masa depan yang berbasis *Mobility as a Service* (MaaS) memerlukan pengaturan yang jelas. Kebijakan ini akan memperkuat koordinasi antara angkutan jalan dengan moda transportasi lainnya, sehingga memungkinkan terciptanya sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan mudah diakses. Pengembangan sistem pembayaran dan layanan on-demand juga akan menjadi bagian penting dari kebijakan ini.
5. Pemenuhan (*Compliancy*) Standar dan Regulasi Internasional di Sektor Transportasi. Dengan semakin terhubungnya pasar global, sektor angkutan jalan di Indonesia perlu menyesuaikan standar dan regulasi dengan ketentuan internasional. Regulasi ini akan memastikan bahwa angkutan jalan dapat bersaing secara efektif di pasar internasional, serta mematuhi aturan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian perdagangan dan lingkungan global. Pemenuhan standar internasional di sektor angkutan jalan juga akan meningkatkan daya saing dan keterlibatan Indonesia dalam perdagangan global.
6. Penguatan regulasi di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat khususnya revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan penyusunan Perpres mengenai Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, terdapat beberapa kebutuhan penguatan regulasi pada unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu:

a. Angkutan Jalan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek diperlukan guna menyesuaikan pelaksanaan perizinan angkutan tersebut. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan juga perlu direvisi, khususnya terkait klasifikasi dan jenis angkutan barang serta sistem perizinan yang ada. Demikian dengan revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek harus dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan perizinan. Semua revisi ini sangat penting agar regulasi yang ada dapat diterapkan dengan lebih efisien dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan saat ini. Direktorat Angkutan Jalan ditunjuk sebagai penanggung jawab utama dalam proses revisi ini, dengan target penyelesaian pada tahun 2025-2026. Beberapa instansi terkait yang akan dilibatkan dalam proses ini meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Investasi/BKPM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Organisasi Angkutan Darat (Organda).

b. Lalu Lintas Jalan

Penguatan regulasi bidang Lalu Lintas Jalan terkait manajemen rekayasa lalu lintas, analisis dampak lalu lintas, penyelenggaraan perlengkapan jalan, dan pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan. Penguatan regulasi ini diperlukan agar pelaksanaan kinerja dari Direktorat Lalu Lintas Jalan dapat dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, penguatan regulasi ini juga akan membantu Direktorat Lalu Lintas Jalan maupun 4 (empat) Subdirektorat yang ada dibawahnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang belum dapat diatasi dalam periode-periode sebelumnya.

c. Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Revisi peraturan ini dibutuhkan untuk menyesuaikan pelaksanaan Uji Tipe dan Uji Berkala kendaraan bermotor. Selain itu, dibutuhkan pengaturan terkait kendaraan bermotor listrik khususnya di aspek perizinan dan keselamatan serta pengaturan berkenaan dengan manajemen keselamatan transportasi jalan, Pengaturan Standar Keselamatan untuk jalur sepeda, trotoar dan halte, dan Pengaturan terkait dengan sosialisasi, promosi, dan kemitraan bidang sarana dan keselamatan.

d. Prasarana Transportasi Jalan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan terkait Penyelenggaraan Terminal Penumpang dan barang Angkutan Jalan serta fasilitas pendukung dan integrasi moda khususnya terkait pembentukan SPM penyelenggaraannya. Selain itu, dibutuhan pengaturan lebih lanjut terkait pembagian peran pelaksanaan UPPKB dan pengaturan lebih spesifik terkait kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

e. Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, Revisi peraturan ini dibutuhkan untuk penyesuaian lebih lanjut terkait alur pelayaran angkutan sungai dan danau. Selain itu, dibutuhkan pembentukan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengerukan dan Reklamasi Sungai dan Danau serta Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penanggulangan Pencemaran Alur Sungai dan Danau serta pengaturan lebih lanjut terkait dengan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan dan pembentukan *blueprint* transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

3.3 Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai 6 (enam) unit kerja Eselon II yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Direktorat Angkutan Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan; dan Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Struktur organisasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dapat dilihat pada gambar berikut.

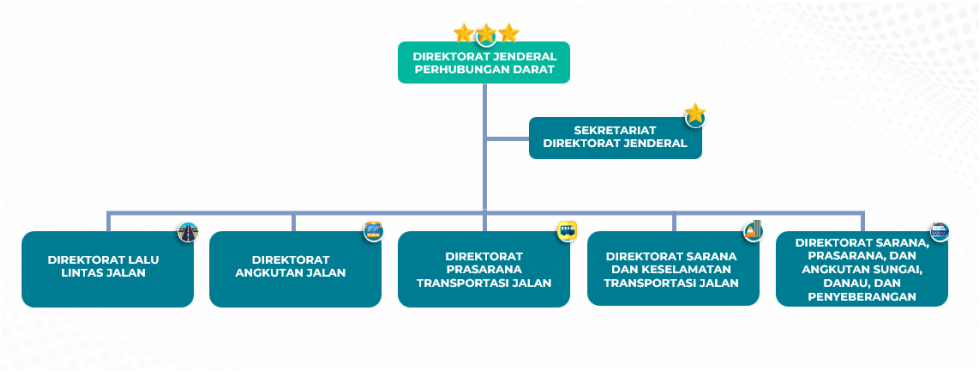

Gambar III. 1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), BPTD merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat dipimpin oleh Kepala. BPTD diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III.

Terdapat 33 Balai Pengelola Transportasi Darat yang tersebar di Indonesia dengan rincian, sebagai berikut:

1) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat
2) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Tengah
3) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Aceh
4) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumetera Utara
5) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Barat
6) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Riau
7) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau
8) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jambi
9) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan
10) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Lampung
11) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Banten
12) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II D.I. Yogyakarta
13) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur
14) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Bali
15) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Barat
16) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Nusa Tenggara Timur
17) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Tengah
18) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat
19) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan
20) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Timur
21) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan
22) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tenggara
23) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Tengah
24) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Gorontalo

25) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Utara
26) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku
27) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara
28) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua
29) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Papua Barat Daya
30) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bengkulu
31) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Bangka Belitung
32) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara
33) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Sulawesi Barat

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Danau Toba (KSOPP Danau Toba), Terdapat KSOPP Danau Toba yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. KSOPP Danau Toba dipimpin oleh Kepala.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi, terdapat Kantor Terminal Tipe A Tirtonadi yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendera dan dipimpin oleh Kepala.

Sejalan dengan arahan Indonesia Emas 2045 dan RPJMN 2025-2029 terkait tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan pelayanan dasar yang berkualitas, transformasi tata kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukit, penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil. Rekomendasi kerangka kelembagaan pendukung implementasi berbagai program dan kegiatan strategis bidang perhubungan darat 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Transportasi Perkotaan Metropolitan

   Pada tahun 2045 proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di kawasan perkotaan akan mendekati angka 70%, sehingga penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan akan menjadi hajat hidup bagi sebagian besar warga negara. Saat ini sejumlah kota besar dan metropolitan di Indonesia tengah mengalami permasalahan yang pelik terkait dengan tingginya tingkat kemacetan dan kurangnya kapabilitas untuk menyelenggarakan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi. Saat ini kelembagaan khusus pendukung penyelenggaraan transportasi perkotaan khususnya kota Aglomerasi Kota Metropolitan di Kementerian Perhubungan tidak secara spesifik karena BPTJ yang semula mengkoordinir transportasi perkotaan jabodetabek saat ini sudah berubah menjadi Ditjen Integrasi Multimoda. Perlu adanya pembentukan unit organisasi setingkat Eselon II untuk mengorkestrasikan

perencanaan dan pembiayaan pengembangan jaringan dan pelayanan transportasi perkotaan metropolitan di Indonesia, termasuk untuk mendorong peran dan kapabilitas pemerintah Daerah dalam kelembagaan dan pendanaan pengelolaan transportasi umum.

2. Penataan Tugas dan Fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan sesuai kebijakan nasional

   rencana pengalihan tugas dan fungsi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan yang semula menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, selaras dengan pasal 6 Undang Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, secara eksplisit mengkategorikan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan sebagai bagian dari "angkutan di perairan", sehingga secara normatif, apabila pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dirasa lebih sesuai dengan kerangka hukum nasional. Dengan pengusulan peralihan tersebut maka bentuk organisasi Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan akan melebur dalam seluruh tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

3. Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat

   Transformasi kelembagaan Kementerian Perhubungan dengan peralihan tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat struktur organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, khususnya dalam aspek keselamatan transportasi darat agar dapat terkoordinasi secara menyeluruh Transportasi darat merupakan moda dominan dalam sistem mobilitas di Indonesia. Namun, pesatnya pertumbuhan kendaraan, lemahnya penegakan hukum, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung keselamatan menjadikan keselamatan transportasi darat sebagai isu krusial nasional. Penataan kelembagaan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat membuka peluang terbentuknya unit kerja setinggal eselon II yang memiliki tugas dan fungsi Keselamatan Transportasi Darat. Pasal 203 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pembentukan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat menjadi suatu langkah strategis untuk koordinasi, pengawasan, dan peningkatan standar keselamatan, sekaligus memperkuat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sebagai penyusun kebijakan strategis dalam pengelolaan transportasi darat yang efektif, efisien, aman, dan nyaman.

4. Penguatan Kelembagaan BPTD dan UPT Perhubungan Darat

   Garda terdepan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan transportasi Ditjen Hubdat adalah keberadaan Balau Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Rentang kendali yang sedemikian jauh serta permasalahan teknis dan non-teknis yang cukup tinggi di lapangan mengharuskan adanya kualitas kelembagaan BPTD dan UPT yang tangguh. Optimalisasi struktur

dan pola kerja organisasi BPTD dan UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan infastruktur, optimalisasi pemanfaatannya, hingga penjaminan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan isu perubahan kelembagaan Dit TSDP yang melebur ke Ditjen Perhubungan Laut dan Dit Keselamatan yang akan dibentuk.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025 – 2029

4.1.1 Target Pencapaian Sasaran Kegiatan

Target kinerja untuk masing-masing Sasaran Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan, Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety terdiri dari 3 (tiga)) Indikator Kinerja Kegiatan, dan Sasaran Kegiatan Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat terdiri dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kegiatan.

Adapun besaran target untuk masing-masing Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dicanangkan untuk masing-masing tahun selama perioda 2025-2029 disampaikan pada **Tabel IV.1**

Tabel IV. 1 Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

No	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	PENANGGUNG JAWAB
1.	SK2.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Unit	-	8	8	9	10	10	Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian
			IKK 2.1.2	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Unit	-	35	35	36	37	37	Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian
			IKK 2.1.3	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Kegiatan	-	5	7	7	7	7	Seksi Penjaminan Mutu
			IKK 2.1.4	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	%	-	100	100	100	100	100	Seksi Pelayanan
			IKK 2.1.5	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Unit	-	7	12	12	13	13	Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian
			IKK2.1.6	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Unit	-	2	10	10	11	11	Seksi Sarana dan Prasarana Pengujian Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
2.	**SK3.2**	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi *Active* dan *Passive Safety*	IKK 3.2.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	-	1.200	1.300	1.310	1.320	1.350	Seksi Pelayanan
			IKK 3.2.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	-	579	637	701	771	848	Seksi Penjaminan Mutu
			IKK 3.2.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	Kegiatan	-	39	40	40	42	42	Seksi Pelayanan
3.	SK4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	-	6	6	6	7	8	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
			IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	-	5	5	5	6	6	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	BASELINE 2024	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	PENANGGUNG JAWAB
		IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	-	10	10	10	12	12	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	-	10	10	10	12	12	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	-	2	2	2	2	2	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	-	3	3	3	3	3	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	-	3	3	3	3	3	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
		IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha

Sumber: Hasil Analisis (2025)

4.1.2 Target Keluaran (*Output*) Pelaksanaan Kegiatan

Pada **Tabel IV.2** disampaikan target keluaran (output) atau proyek prioritas dari pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Secara umum target keluaran yang ditargetkan dari setiap kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program infrastruktur konektivitas dan progtam dukungan manajemen selama periode 2025-2029.

Secara lebih detail rincian tentang lokasi pelaksanaan kegiatan berikut dengan usulan kebutuhan pendanaannya disampaikan pada **Lampiran 2**. Usulan output kegiatan yang disampaikan merupakan pelaksanan/implementasi di lapangan dari arah kebijakan dan strategi.

Tabel IV. 2 Tabel Keluaran (Output) RENSTRA Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
1.	IKK 2.1.1 Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Emisi Gas Buang Sepeda Motor - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Emisi Gas Buang Heavy Duty - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Dimensi dan Konstruksi - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Passanger Car dan Sepeda Motor - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Heavy Duty - Perbaikan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Pendukungnya - Penggantian gas kalibrasi	Unit	8	8	9	10	10
	IKK 2.1.2 Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor - Kalibrasi dan verifikasi Peralatan Pengujian dan Fasilitas Pendukungnya	Tahun	1	1	1	1	1
	IKK 2.1.3 Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor - Uji Banding Pengujian Sesuai ISO 17025 - Survailance ISO 17025 : 2017 Laboratorium Pengujian - Survailance ISO 9001:2015 - Akreditasi ISO 45001 K3 - Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 2.1.4 Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	Pendukung Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat - pengadaan pengembangan sarana dan prasarana internal - penunjang fasilitas layanan	Unit	3	3	3	3	3
	IKK 2.1.5 Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Pendukung Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Emisi Gas Buang Sepeda Motor - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Emisi Gas Buang Heavy Duty - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Dimensi dan Konstruksi - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Passenger Car dan Sepeda Motor	Unit	7	12	12	13	13

No	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		- Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Kendaraan Heavy Duty - Pengadaan Peralatan Penunjang Keselamatan Kerja - Pengadaan Kendaraan Fungsional Guide Car Proving Ground - Pengadaan Alat Komunikasi Antar Laboratorium - Peningkatan Lantai Kerja Gedung Laboratorium Uji Dimensi dan Konstruksi - Review DED Revitalisasi Gedung Laboratorium Uji Prestasi - Revitalisasi Gedung Laboratorium Uji Prestasi - Supervisi Revitalisasi Gedung Laboratorium Uji Prestasi						
	IKK 2.1.6 Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Pendukung Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat - Pengadaan Cubicle - Pengadaan Trafo - Pengadaan Fasilitas Olahraga - Revitalisasi Sistem Kelistrikan Tahap II Selesai - Revitalisasi Ruang SIPINTER - Review DED Peningkatan Gedung Dan Akses Jalan Faspel - Peningkatan Gedung Dan Akses Jalan Faspel - Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Non KSPI - Pengadaan License Aplikasi Pendukung	Unit	2	10	10	11	11
2.	IKK 3.2.1 Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pemeriksaan Uji Sampel dan Uji Varian - Belanja Kebutuhan Rutin Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 3.2.2 Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pengadaan Media Penunjang Pelaporan Kegiatan Pemeriksaan RB Kendaraan Bermotor - Monitoring dan Pemeriksaan Fisik Karoseri - Pengadaan Barang Penunjang Kegiatan Pemeriksaan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 3.2.3 Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring Hasil Uji Kendaraan	Laporan	12	12	12	12	12
3.	IKK 4.1 Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Transportasi Darat pada BPLJSKB	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKA-K/L - Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Hubdat - Pmbahasan Usulan Kegiatan BPLJSKB - Pembekalan Teknis Bidang Perhubungan Darat - Pelaksanaan koordinasi dan Evaluasi kegiatan perencanaan	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 4.2 Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pemantauan dan Evaluasi dokumen SAKIP - Peningkatan Kapasitas Penyusunan SPIP - Penyusunan dokumen SAKIP - Pendampingan Penyusunan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 4.3 Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan - Evaluasi Pengelola Keuangan - Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Layanan Umum	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 4.4 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara - Penatausahaan BMN - Penggunaan dan Penghapusan BMN - Pemindahtanganan BMN - Penyusunan Laporan Barang Milik Negara - Pengawasan dan Pengendalian BMN	Laporan	12	12	12	12	12

No	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO/RO/KEGIATAN	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		- Serah Terima Barang Milik Negara						
	IKK 4.5 Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK dan ITJEN - Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 4.6 Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Penataan Arsip - Digitalisasi Arsip (Pengalihan Arsip Kertas Ke Media Penyimpanan Elektronik) - Layanan Operasional Perkantoran - Pemeliharaan Peralatan, Mesin, Gedung dan Bangunan - Pengadaan Peralatan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi BPLJSKB - Pengadaan barang konsumsi - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	IKK 4.7 Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Sosialisasi/Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 4.8 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	- Peningkatan Kompetensi Pegawai (Capacity Building) berupa diklat - Peningkatan Motivasi Pegawai - Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian - Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	1	1	1	1
	IKK 4.9 Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat - Kegiatan UPG, UKI dan Benturan Kepentingan	Laporan	12	12	12	12	12
	IKK 4.10 Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi Kegiatan pelayanan di BPLJSKB	Layanan	1	1	1	1	1

4.2 Kerangka Pendanaan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029

4.2.1 Kebutuhan Pendanaan

Tabel Kerangka Pendanaan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor disusun sebagai instrumen perencanaan strategis untuk memastikan keterpaduan antara sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, keluaran kegiatan, dan alokasi anggaran selama periode 2025–2029. Kerangka ini menggambarkan komitmen Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik melalui perencanaan dan penganggaran yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tabel ini menjadi acuan penting bagi pengambilan keputusan manajerial serta pengendalian kinerja dan anggaran secara akuntabel dan transparan.

Secara lebih detail Target Indikator dan Kerangka Pendanaan disampaikan pada tabel IV.3

Tabel IV. 3 Target Indikator dan Kerangka Pendanaan 2025-2029

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/ SBSN)
									2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1.1	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Unit	8	8	9	10	10	Unit	6.800.000	7.350.000	7.350.000	7.400.000	7.400.000	BLU
IKK 2.1.2	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Unit	35	35	36	37	37	Tahun	100.000	334.330	334.330	384.330	385.000	BLU
IKK 2.1.3	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Kegiatan	5	7	7	7	7	Laporan	407.402	756.556	756.556	766.556	766.556	BLU
IKK 2.1.4	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	%	100	100	100	100	100	Unit	326.000	975.000	975.000	985.000	985.000	BLU
IKK 2.1.5	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Unit	7	12	12	13	13	Unit	1.420.000	4.573.690	4.573.690	4.673.690	4.673.690	BLU
IKK 2.1.6	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Unit	2	10	10	11	11	Unit	3.570.000	5.005.000	5.100.000	5.150.000	5.150.000	BLU
IKK 3.2.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	1.200	1.300	1.310	1.320	1.350	Laporan	539.632	812.288	822.288	825.000	825.000	BLU

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/ SBSN)
									2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 3.2.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	579	637	701	771	848	Laporan	742.780	763.632	875.340	875.340	875.340	RM BLU
IKK 3.2.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	Kegiatan	39	40	40	42	42	Laporan	86.208	102.272	102.272	112.272	112.272	BLU
IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	6	6	6	7	8	Laporan	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000	RM
IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	5	5	5	6	6	Laporan	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	RM
IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	10	10	10	12	12	Laporan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	RM
IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	10	10	10	12	12	Laporan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	RM
IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Kegiatan	2	2	2	2	2	Laporan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	BLU
IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	2	2	2	2	2	Layanan	17.938.064	23.041.782	32.391.380	43.481.392	48.372.904	RM

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/ SBSN)
									2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Laporan	50.000	59.600	59.600	60.000	60.000	RM BLU
IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	3	3	Layanan	15.108.178	12.364.633	14.442.787	9.334.858	9.535.392	RM
IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	3	3	Laporan	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	RM
IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	1	1	Layanan	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	RM

Tabel Kerangka Pendanaan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor menyajikan rincian keterkaitan antara sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, KRO/RO/kegiatan, serta proyeksi pendanaan tahunan pada periode 2025–2029. Setiap sasaran kegiatan diterjemahkan ke dalam indikator yang terukur, kemudian dioperasionalkan melalui rangkaian kegiatan masing-masing unit kerja Eselon IV.

Alokasi anggaran disusun secara bertahap dan berjenjang untuk menjamin kesinambungan program, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik. Selain itu, tabel ini juga mencerminkan prinsip *value for money* dengan menyeimbangkan antara kebutuhan belanja operasional, pengembangan SDM, digitalisasi layanan, dan penguatan fungsi pengawasan. Melalui kerangka pendanaan ini, diharapkan pelaksanaan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan selaras dengan target kinerja tahunan, sekaligus menjadi dasar evaluasi capaian dan penyesuaian.

4.2.2 Skema Pendanaan

Skema pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk periode tahun 2025–2029 berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Badan Layanan Umum (BLU). Secara keseluruhan, skema pendanaan tersebut mencerminkan arah kemandirian Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum yang mampu menghasilkan, mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaan pembiayaan secara profesional dan proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun skema pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pada semua kegiatan tersebut pada Tabel 4.3 diatas disampaikan pada Gambar IV.1.

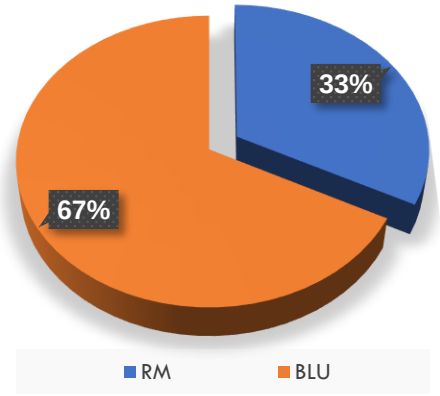

Gambar IV. 1 Skema Pendanaan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Darat Tahun 2025-2029

4.3 Manajemen Risiko Pembangunan Nasional Bidang Transportasi Darat Tahun 2025-2029

Matriks Manajemen Risiko Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025–2029 disusun sebagai instrumen pengendalian strategis untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan dan indikator kinerja secara efektif dan akuntabel. Matriks ini mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal. Pengelolaan risiko tidak hanya menjadi tanggung jawab Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, tetapi juga melibatkan direktorat teknis, serta pemangku kepentingan eksternal guna menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan transportasi darat.

Tabel IV. 4 Matrik Manajemen Risiko BPLJSKB Dalam Renstra 2025-2029

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO
1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	Pemeliharaan/Peningkatan/ Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Ketidakpastian jadwal pemeliharaan alat uji	- Seksi Sarana dan Prasarana - Seksi Layanan	Prosedur pemeliharaan alat harus menunggu ketika alat tidak digunakan saat pengujian	Mengganggu kinerja pelayanan pengujian	Menyusun jadwal pemeliharaan rutin dan dipublikasikan kepada pengguna layanan
			Kerusakan alat pengujian	- Seksi Sarana dan Prasarana - Seksi Layanan	Kurangnya pemahaman pengguna alat terkait pengoperasian alat yang sesuai standar	Kegiatan pengujian tidak dapat berjalan dengan baik	Pelatihan penggunaan alat pengujian kepada petugas pengujian
		Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Hasil pengukuran dari peralatan pengujian tidak akurat	Seksi Sarana dan Prasarana	Peralatan pengujian terlambat dikalibrasi dan tidak memiliki sertifikat kalibrasi	Mengganggu kinerja pelayanan pengujian dan komplain dari penerima layanan	Mengajukan standar sertifikat kalibrasi alat penggujian
		Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Fasilitas layanan pengujian tidak memadai	- Kepala Balai PLJSKB - Seksi Penjaminan Mutu	Pemeliharaan/perbaikan fasilitas layanan pengujian terlambat dilakukan	Mengganggu kinerja pelayanan pengujian	Melakukan Identifikasi pengembangan fasilitas dan jadwal pemeliharaan/perbaikan
			Temuan level 1 (ketidaksesuaian mayor)	- Kepala Balai PLJSKB - Seksi Penjaminan Mutu	tidak adanya penerapan secara keseluruhan terhadap salah satu persyaratan standar ISO 17025, yang berpotensi memengaruhi validitas hasil pengujian atau kalibrasi laboratorium	Sertifikat ISO dicabut	Melakukan *Root Cause Analysis* dan melakukan tindakan korektif yang terperinci untuk jangka pendek dan jangka panjang
		Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	Penerapan inovasi terkendala waktu	- Kepala Balai PLJSKB - Kasi Layanan - Kasi Penjaminan Mutu	Waktu penerapan inovasi mundur	Indeks Kepuasan Masyarakat menurun	Melakukan evaluasi secara menyeluruh
		Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Kualitas Sarana dan Prasarana	Seksi Sarana dan Prasarana	Kurangnya pengawasan	Kenyamanan dan fasilitas pengujian tidak terjamin	Monitoring dan evaluasi secara berkala

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO
2	Meningkatnya Kepatuhan Kendaraan Bermotor Memenuhi Active dan Passive Safety	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Tidak tercapainya target pengujian kendaraan	Kepala Balai PLJSKB Seksi Layanan	Menurunnya permintaan pengujian kendaraan	Menurunnya pendapatan BLU BPLJSKB	Optimalisasi pendapatan BLU non pengujian tipe
						Berkurangnya alokasi belanja BLU BPLJSKB	Melakukan revisi kegiatan belanja sumber dana BLU
		Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Hasil pengujian tidak sesuai spesifikasi	Seksi Penjaminan Mutu	Kurangnya ketelitian dari petugas pelaksana karena kelelahan	Mengganggu kinerja pelayanan pengujian dan komplain dari penerima layanan	Melakukan reviu tim/petugas pelaksana dengan jumlah lokasi dan jumlah unit kendaraan
		Jumlah Pengadaan peralatan penunjang pengujian	Ketersediaan anggaran	Seksi Layanan	Perubahan kebijakan pengadaan peralatan pengujian	Mengganggu kinerja pelayanan pengujian	Menggunakan alternatif anggaran selain RM
		Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	Ketersediaan anggaran	Seksi Layanan	Perubahan kebijakan pagu anggaran belanja perjalanan dinas	Data evaluasi pelayanan pengujian tipe tidak optimal	Menggunakan alternatif anggaran selain RM
3	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Perencanaan tidak komprehensif	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Kelemahan SDM dan kurang koordinasi antar seksi	Kualitas layanan atau output menurun	Menganalisis dan monitoring secara terus menerus
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPLJSKB (Nilai SAKIP)	Tingkat reputasi organisasi	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Indikator tidak selaras dan sejalan dengan tupoksi	Nilai SAKIP menurun	Evaluasi dan Penerapan strategi Manajemen Kinerja
		Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis (Nilai IKPA)	Perencanaan tidak komprehensif	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Perubahan kebijakan dan skala prioritas	Nilai IKPA tidak tercapai	Evaluasi yang cermat terhadap kebutuhan anggaran dan kegiatan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RISIKO	PEMILIK RISIKO	PENYEBAB	AKIBAT	MITIGASI RISIKO
		Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kementerian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	Tingkat kepatuhan organisasi	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Kurangnya komitmen pimpinan dalam penyelesaian temuan	Hasil temuan tidak dapat terselesaikan	Melakukan komunikasi dan koordinasi secara terus menerus
		Digitalisasi Arsip	Perencanaan tidak komprehensif	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Perubahan arah kebijakan	Kinerja layanan operasional menurun	Melakukan komunikasi dan koordinasi secara terus menerus
		Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (nilai LKE)	Tingkat reputasi organisasi	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Kurangnya komitmen pimpinan untuk mendukung pembangunan ZI	Nilai Kinerja pelayanan organisasi rendah	Komunikasi dan Evaluasi secara berkala
		Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Kelemahan SDM yang dimandatkan dan Kelemahan pengawasan	Kualitas tidak sesuai dan dibawah standar	Komuniksi dan koordinasi serta pengawasan yang ketat
		Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Sitem pendukung belum tersedia	Bias dalam pengukuran pelaksanaan merit sistem	Komuniksi dan koordinasi serta pengawasan yang ketat
		Penilaian Maturiy Rating	Ketersediaan sarana dan Prasarana	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Sitem pendukung belum tersedia	Penyajian data membutuhkan waktu yang lama	Komunikasi dan Evaluasi secara berkala
			Kualitas data layanan	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	Kelemahan SDM yang dimandatkan	Data yang disajikan tidak akurat	Komunikasi dan Evaluasi secara berkala

Matriks Manajemen Risiko ini dirancang dengan pendekatan kolaboratif lintas pemilik risiko untuk mencerminkan kompleksitas penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, setiap risiko dianalisis secara sistematis dengan menguraikan penyebab, akibat, serta strategi mitigasi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing pemilik risiko.

Pendekatan ini memungkinkan penguatan koordinasi perencanaan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis data, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Dengan demikian, matriks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi risiko, tetapi juga sebagai sarana penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan pencapaian sasaran strategis Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor secara berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat 2025-2029 ini disusun sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundangan, dokumen perencanaan, dan juga penugasan kepada Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.

Berbagai tantangan akan dihadapi dalam penyelenggaraan jalan dalam 5 tahun ke depan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan, transformasi teknologi, kelangkaan energi, hingga persaingan ekonomi global.

Target dan capaian kinerja yang dimuat di dalam dokumen Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 ini bersifat indikatif, sehingga potensi terjadinya deviasi dalam implementasinya masih cukup terbuka. Namun demikan, pencapaian target maupun peningkatan kinerja akan sangat bermanfaat dalam mendukung penyelenggaraan transportasi darat pada umumnya dan penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor khususnya.

5.2 Arahan Pimpinan

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor 2025-2029 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan di Lingkungan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor untuk Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Tahun Anggaran 2029.

Selanjutnya, kinerja pimpinan Satuan Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029 akan dinilai berdasarkan pencapaian output kegiatan serta pencapaian kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini. Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dengan memperhatikan susunan target dan capaian dalam dokumen Renstra ini.

5.3 Mekanisme Evaluasi

Dokumen Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029 ini dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis yang mengharuskan adanya penyesuaian dalam arah kebijakan, target kinerja maupun rencana program/kegiatan yang harus dilaksanakan, khususnya dari level diatasnya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029 ini setidak-tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2027) untuk mengukur keberhasilan pencapaian

target kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029).

Evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan Renstra ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance).*

LAMPIRAN

Lampiran I Manual Perhitungan Target Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
1	IKK 2.1.1	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Indikator yang menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Indikator Kinerja Kegiatan Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya dihitung berdasarkan jumlah realisasi Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya terhadap target Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya yang telah ditentukan	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya = Realisasi Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
2	IKK 2.1.2	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Indikator penunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat berupa proses kalibarasi dan verifikasi peralatan pengujian kendaraan bermotor. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan mengukur keakuratan alat Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kondisi standar yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan keandalan alat uji, sehingga dapat memberikan hasil yang tepat dalam pemeriksaan kendaraan. Indikator Kinerja Kegiatan Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya dihitung berdasarkan realisasi jumlah kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya terhadap target kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan.	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya = Realisasi Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
3	IKK 2.1.3	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Merupakan Indikator yang bertujuan untuk mendukung kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor kegiatan yang akan dilaksanakan baik berupa sistem, metode, maupun sarana dan prasarana yang digunakan. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe dihitung berdasarkan jumlah realisasi Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe terhadap target Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe diharapakan mampu membantu manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe = Realisasi Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
4	IKK 2.1.4	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan menunjang Tupoksi Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam memberikan pelayanan pengujian tipe kepada masyarakat. Peningkatan Kualitas Layanan dapat dilakukan dengan memperkenalkan inovasi layanan kepada pengguna jasa. Inovasi yang dilakukan oleh BPLJSKB merupakan inovasi baik menggunakan teknologi informasi maupun berupa penyempurnaan bisnis proses/tata kelola BLU, layanan baru yang belum pernah ada sebelumnya yang dirasakan langsung dampaknya kepada pengguna jasa BPLJSKB	Tahapan bobot: Rencana penerapan inovasi layanan sudah difinalisasi 20 Inovasi layanan dalam pengembangan atau penyusunan 25 Inovasi layanan dalam tahap uji coba 25 Inovasi layanan sudah diluncurkan/diterapkan, meski belum secara penuh 30 Inovasi layanan sudah diluncurkan/diterapkan secara penuh 20 Inovasi layanan sudah berdampak pada peningkatan layanan 30	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
5	IKK 2.1.5	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe berupa pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan pengujian tipe atau penunjang pengujian tipe. Selain itu, Indikator pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe bertujuan untuk meningkatkan fasilitas sarana layanan pengujian tipe sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe diukur berdasarkan jumlah realisasi Pengembangan sarana dan prasarana pengujian tipe sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini diharapakan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe.	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe = Realisasi Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
6	IKK 2.1.6	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang adalah Indikator yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan berupa pengadaan dan/atau pemeliharaan peralatan penunjang. Selain itu, Indikator pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang operasional perkantoran. Indikator Kinerja Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang diukur berdasarkan jumlah realisasi Pengembangan sarana dan prasarana layanan penunjang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini diharapakan mampu membantu manajemen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe.	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang = Realisasi Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
7	IKK 3.2.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Merupakan indikator yang mengukur kinerja Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor dalam melaksanakan pengujian yang dilakukan terhadap seluruh jenis layanan pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan realisasi Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap target Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan.	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor = Realisasi Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
8	IKK 3.2.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian hasil pembuatan dan/atau perakitan rumah-rumah dan/atau bak muatan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan terhadap data rancang bangun yang diajukan oleh perusahaan karoseri sebelum dioperasikan di jalan. Indikator Kinerja Kegiatan Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman diukur berdasarkan realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman terhadap target Kegiatan Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman yang telah ditetapkan.	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman = Realisasi Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
9	IKK 3.2.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	Indikator Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor merupakan kegiatan pematauan dan evaluasi terhadap pelayanan pengujian tipe yang dilaksanakan oleh Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor diharapakan mampu membantu kinerja dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengujian tipe kendaraan bermotor di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor = Realisasi Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
10	IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Merupakan Indikator yang mencerminkan kesesuaian dan keterpaduan kebijakan perencanaan dan pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang transportasi darat di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan di Balai Pengujian Laik Jalan dan sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif) = Realisasi Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
11	IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Merupakan indikator yang berisi kegiatan terkait dengan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020).	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) = Realisasi Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
12	IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan kinerja tata kelola keuangan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor.	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran = Realisasi Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
13	IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Indikator Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) merupakan Kegiatan terkait dengan Peningkatan Kinerja pengelolaan Aset dan BMN di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor) = Realisasi Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
14	IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) merupakan kegiatan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK yang menjadi pertimbangan opini Laporan Keuangan, dan entitas wajib menindaklanjuti dalam 60 hari setelah LHP diterima.	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses) = Realisasi Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
15	IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan Proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan kearsipan dan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kearsipan tetap berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan = Realisasi Kegiatan Pengawasan Kearsipan	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		URAIAN	RUMUS	BASELINE	KETERANGAN
16	IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan ukuran keberhasilan sebuah instansi dalam menyelesaikan dan menindaklanjuti keluhan atau aspirasi publik yang masuk melalui sistem LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Selain itu, menunjukkan sejauh mana komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, melindungi hak warga negara, dan melakukan perbaikan berkelanjutan, menjadi indikator penting dalam evaluasi kinerja pelayanan publik nasional	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) = Realisasi Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
17	IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Merupakan standar penilaian terukur yang digunakan untuk mengevaluasi penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor). Kegiatan indikator Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat berupa pengembangan kompetensi SDM, motivasi pegawai dan termasuk kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat = Realisasi Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
17	IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Ukuran terukur yang menunjukkan sejauh mana suatu unit kerja berhasil membangun komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima, melalui perbaikan di enam area perubahan utama: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang berujung pada predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas pelayanan.	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat = Realisasi Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya
17	IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Merupakan alat ukur kuantitatif dan kualitatif untuk menilai kepuasan publik terhadap layanan transportasi, meliputi aspek seperti persyaratan, prosedur, waktu, biaya, kompetensi petugas, hingga sarana prasarana. Hasil IKM menunjukkan seberapa baik pelayanan transportasi telah memenuhi harapan masyarakat, menjadi dasar perbaikan kinerja dan evaluasi keberhasilan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan efisien.	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat = Realisasi Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	-	Merupakan indikator baru sehingga tidak ada data baseline yang dapat disajaikan dalam renstra tahun sebelumnya

Lampiran II Indikasi Kebutuhan Pendanaan Rencana Strategis Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor Tahun 2025-2029

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/SBSN)
										2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1.1	Pemeliharaan/Peningkatan/Perbaikan Peralatan pengujian beserta penunjangnya	Unit	8	8	9	10	10	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Emisi Gas Buang Sepeda Motor - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Emisi Gas Buang Heavy Duty - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Dimensi dan Konstruksi - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Passanger Car dan Sepeda Motor - Pemeliharaan Peralatan Pengujian Heavy Duty - Perbaikan Peralatan Pengujian dan Fasilitas Pendukungnya - Penggantian gas kalibrasi	Unit	6.800.000	7.350.000	7.350.000	7.400.000	7.400.000	BLU
IKK 2.1.2	Kalibrasi dan verifikasi peralatan pengujian dan fasilitas pendukungnya	Unit	35	35	36	37	37	Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor - Kalibrasi dan verifikasi Peralatan Pengujian dan Fasilitas Pendukungnya	Tahun	100.000	334.330	334.330	384.330	385.000	BLU
IKK 2.1.3	Peningkatan Kualitas Dukungan Pelayanan Pengujian Tipe	Kegiatan	5	7	7	7	7	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring Perkembangan Teknologi Kendaraan Bermotor - Uji Banding Pengujian Sesuai ISO 17025 - Survailance ISO 17025 : 2017 Laboratorium Pengujian - Survailance ISO 9001:2015 - Akreditasi ISO 45001 K3 - Akreditasi ISO 17025:2017 Laboratorium Kalibrasi	Laporan	407.402	756.556	756.556	766.556	766.556	BLU

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/SBSN)
										2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1.4	Persentase Penerapan Inovasi Pelayanan pengujian	%	100	100	100	100	100	Pendukung Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat - pengadaan pengembangan sarana dan prasarana internal - penunjang fasilitas layanan	Unit	326.000	975.000	975.000	985.000	985.000	BLU
IKK 2.1.5	Pengembangan sarana dan Prasarana pengujian tipe	Unit	7	12	12	13	13	Pendukung Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Emisi Gas Buang Sepeda Motor - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Emisi Gas Buang Heavy Duty - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Dimensi dan Konstruksi - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Passenger Car dan Sepeda Motor - Pengadaan Peralatan Penunjang Pengujian Kendaraan Heavy Duty - Pengadaan Peralatan Penunjang Keselamatan Kerja - Pengadaan Kendaraan Fungsional Guide Car Proving Ground - Pengadaan Alat Komunikasi Antar Laboratorium - Peningkatan Lantai Kerja Gedung Laboratorium Uji Dimensi dan Konstruksi - Review DED Revitalisasi Gedung Laboratorium Uji Prestasi - Revitalisasi Gedung Laboratorium Uji Prestasi - Supervisi Revitalisasi Gedung Laboratorium Uji Prestasi	Unit	1.420.000	4.573.690	4.573.690	4.673.690	4.673.690	BLU

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/SBSN)
										2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 2.1.6	Pengembangan sarana dan Prasarana layanan penunjang	Unit	2	10	10	11	11	Pendukung Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat - Pengadaan Cubicle - Pengadaan Trafo - Pengadaan Fasilitas Olahraga - Revitalisasi Sistem Kelistrikan Tahap II Selesai - Revitalisasi Ruang SIPINTER - Review DED Peningkatan Gedung Dan Akses Jalan Faspel - Peningkatan Gedung Dan Akses Jalan Faspel - Pengadaan Perangkat Jaringan Internet Non KSPI - Pengadaan License Aplikasi Pendukung	Unit	3.570.000	5.005.000	5.100.000	5.150.000	5.150.000	BLU
IKK 3.2.1	Jumlah Total Volume Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit	1.200	1.300	1.310	1.320	1.350	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pemeriksaan Uji Sampel dan Uji Varian - Belanja Kebutuhan Rutin Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor	Laporan	539.632	812.288	822.288	825.000	825.000	BLU
IKK 3.2.2	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan Sesuai dengan Pedoman	Kegiatan	579	637	701	771	848	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pengadaan Media Penunjang Pelaporan Kegiatan Pemeriksaan RB Kendaraan Bermotor - Monitoring dan Pemeriksaan Fisik Karoseri - Pengadaan Barang Penunjang Kegiatan Pemeriksaan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Laporan	742.780	763.632	875.340	875.340	875.340	RM BLU
IKK 3.2.3	Jumlah kegiatan monitoring hasil uji tipe kendaraan bermotor	Kegiatan	39	40	40	42	42	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring Hasil Uji Kendaraan	Laporan	86.208	102.272	102.272	112.272	112.272	BLU

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/SBSN)
										2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.1	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat (kumulatif)	Kegiatan	6	6	6	7	8	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan - Penyusunan RKA-K/L - Rapat Koordinasi Teknis Ditjen Hubdat - Pmbahasan Usulan Kegiatan BPLJSKB - Pembekalan Teknis Bidang Perhubungan Darat - Pelaksanaan koordinasi dan Evaluasi kegiatan perencanaan	Laporan	15.000	30.000	30.000	32.000	32.000	RM
IKK 4.2	Jumlah Kegiatan Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Kegiatan	5	5	5	6	6	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pemantauan dan Evaluasi dokumen SAKIP - Peningkatan Kapasitas Penyusunan SPIP - Penyusunan dokumen SAKIP - Pendampingan Penyusunan dan Pelaksanaan Manajemen Risiko	Laporan	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004	RM
IKK 4.3	Jumlah Kegiatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Kegiatan	10	10	10	12	12	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan - Evaluasi Pengelola Keuangan - Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) - Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kinerja - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan Layanan Umum	Laporan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	RM

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/SBSN)
										2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.4	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Aset (Skor)	Kegiatan	10	10	10	12	12	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan '- Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara - Penatausahaan BMN - Penggunaan dan Penghapusan BMN - Pemindahtanganan BMN - Penyusunan Laporan Barang Milik Negara - Pengawasan dan Pengendalian BMN - Serah Terima Barang Milik Negara	Laporan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	RM
IKK 4.5	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK dan ITJEN (Status Proses)	Kegiatan	2	2	2	2	2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit BPK dan ITJEN - Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Laporan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	BLU
IKK 4.6	Jumlah Kegiatan Pengawasan Kearsipan	Kegiatan	2	2	2	2	2	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan - Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Penataan Arsip - Digitalisasi Arsip (Pengalihan Arsip Kertas Ke Media Penyimpanan Elektronik) - Layanan Operasional Perkantoran - Pemeliharaan Peralatan, Mesin, Gedung dan Bangunan - Pengadaan Peralatan Penunjang Tugas Pokok dan Fungsi BPLJSKB - Pengadaan barang konsumsi - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Layanan	17.938.064	23.041.782	32.391.380	43.481.392	48.372.904	RM

KODE IKK	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET IKK 2025	TARGET IKK 2026	TARGET IKK 2027	TARGET IKK 2028	TARGET IKK 2029	RINCIAN OUTPUT (RO)	SATUAN	ANGGARAN (Dalam Ribu Rupiah)					KETERANGAN (RM/PNBP/SBSN)
										2025	2026	2027	2028	2029	
IKK 4.7	Jumlah Kegiatan Peningkatan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Kegiatan	1	1	1	1	1	Sosialisasi/Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Laporan	50.000	59.600	59.600	60.000	60.000	RM BLU
IKK 4.8	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	3	3	- Peningkatan Kompetensi Pegawai (Capacity Building) berupa diklat - Peningkatan Motivasi Pegawai - Rapat Koordinasi Bidang Kepegawaian - Layanan Perkantoran berupa Gaji dan Tunjangan	Layanan	15.108.178	12.364.633	14.442.787	9.334.858	9.535.392	RM
IKK 4.9	Jumlah Kegiatan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	3	3	3	3	3	Kegiatan Sosialisasi Pembangunan ZI di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat - Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat - Kegiatan UPG, UKI dan Benturan Kepentingan	Laporan	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	RM
IKK 4.10	Jumlah Kegiatan Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1	1	1	1	1	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi Kegiatan pelayanan di BPLJSKB	Layanan	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	RM

Sumber: Hasil Analisis (2025

RENCANA STRATEGIS

2025-2029

Scan for
automatic redirection
to contacts & other.

bpjjskb@kemenhub.go.id

balaipjjskb